

PT SMR UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS WITH
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

DAFTAR ISI/
TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statements
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 - 57	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>
INFORMASI TAMBAHAN - LAMPIRAN		SUPPLEMENTARY INFORMATION - APPENDIX
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	I	<i>Statements of Financial Position - Parent Entity</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Entitas Induk	II	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Entity</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	III	<i>Statements of Changes in Equity - Parent Entity</i>
Laporan Arus Kas Entitas Induk	IV	<i>Statements of Cash Flows - Parent Entity</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT SMR UTAMA, Tbk
DAN ENTITAS ANAK
31 DESEMBER 2025 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
PT SMR UTAMA, Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gani Bustan
Alamat kantor : Puri Mutiara A12 & A15, Jl. Griya
Utama, Sunter Agung, Kec. Tj.
Priok, DKI Jakarta 14350
Jabatan : Direktur

I, the undersigned:

Name : Gani Bustan
Office address : Puri Mutiara A12 & A15, Griya
Utama Street, Sunter Agung,
Tanjung Priok District, Jakarta
14350
Title : Director

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT SMR Utama, Tbk dan Entitas Anak.
2. Laporan keuangan konsolidasian PT SMR Utama, Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT SMR Utama, Tbk dan Entitas Anak Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian PT SMR Utama, Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam PT SMR Utama, Tbk dan Entitas Anak.

Stated that:

1. I am responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT SMR Utama, Tbk and Its Subsidiaries.
2. The consolidated financial statements of PT SMR Utama, Tbk and Its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the consolidated financial statements of PT SMR Utama, Tbk and Its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner.
b. The consolidated financial statements of PT SMR Utama, Tbk and Its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or material facts.
4. I am responsible for the internal control system of PT SMR Utama, Tbk and Its Subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Board of Directors

Jakarta, 12 Mei 2026/ May 12, 2026



Gani Bustan
Direktur/Director

Head Office

Rukan Puri Mutiara A. 12 & A. 15
Jl. Griya Utama, RT. 2 RW. 5
Sunter Agung, Kec. Tj. Priok
Jakarta - 14350
Tel. (62 21) 653 10822
Fax. (62 21) 653 10823
www.smrutama.com

No. 00063/2.0935/AU.1/02/0977-1/1/V/2026

Laporan Auditor Independen**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT SMR Utama, Tbk****Opini Wajar dengan Pengecualian**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT SMR Utama, Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

- a. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 12 dan 13 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025 saldo goodwill dan asset eksplorasi dan evaluasi masing-masing sebesar Rp215,43 milyar dan Rp272,76 milyar.

Pada tanggal 31 Januari 2023, gugatan PT Delta Samudra (DS) kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI perihal pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Delta Samudra dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga dengan putusan tersebut mewajibkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI untuk mencabut surat pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Delta Samudra.

Kemudian melalui Surat Pemberitahuan Banding E-court pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) pada tanggal 15 Februari 2023 telah menyatakan Banding terhadap

No. 00063/2.0935/AU.1/02/0977-1/1/V/2026

Independent Auditor's Report**The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT SMR Utama, Tbk****Qualified Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT SMR Utama, Tbk and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as at December 31, 2025, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including information on material accounting policy.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph of our report, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Qualified Opinion

- a. *As disclosed in Notes 12 and 13 to the accompanying consolidated financial statements, as of December 31, 2025, the balance of goodwill and exploration and evaluation assets amounted to Rp215.43 billion and Rp272.76 billion, respectively.*

On January 31 2023, PT Delta Samudra (DS)'s lawsuit against the Minister of Investment/Head of BKPM RI on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia regarding the revocation of PT Delta Samudra's Mining Business License (IUP) was granted by the State Administrative Court (PTUN) so that this decision obliged the Minister of Investment/Head of BKPM RI on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia to revoke the letter of revocation of PT Delta Samudra's Mining Business Permit (IUP).

Then, through an E-court Appeal Notification Letter, the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM) on February 15, 2023 declared an appeal against the Decision of the Jakarta

Putusan Pengadilan tata usaha Negara Jakarta No. 224/G/2022/PTUN JKT tanggal 31 Januari 2023. Pada tanggal 22 Februari 2023 pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) (Tergugat I Pembading), telah menggunggah/mengupload memori Banding No: 224/G/2022/PTUN-JKT melalui system informasi perkara (E-Court), yang telah diverifikasi pada tanggal 23 Februari 2023.

Berdasarkan Putusan No. 179/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 23 Agustus 2023 diputuskan bahwa menerima permohonan banding dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta NO.224/GI20221PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2023.

Pada tanggal 19 Februari 2024 Grup telah menyampaikan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 23 Agustus 2023 sebagai Upaya untuk memperoleh kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) DS yang telah dicabut.

Sampai dengan laporan keuangan konsolidasian Grup ini diterbitkan upaya hukum Peninjauan Kembali masih dalam proses, sehingga kami tidak dapat memperoleh informasi yang cukup dan bukti yang memadai untuk dapat meyakini dengan prosedur alternatif lain tentang jumlah terpulihkan aset eksplorasi dan evaluasi maupun goodwill. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap saldo aset eksplorasi dan evaluasi maupun goodwill.

- b. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi sehubungan penyitaan aset PT Ricobana Abadi (RBA) dan selain itu kami tidak melakukan observasi fisik atas aset tetap sehingga kami tidak dapat menentukan dampak penyesuaian dan pembentukan cadangan penurunan nilai yang diperlukan pada laporan keuangan konsolidasian.
- c. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 16 dan 20 atas laporan keuangan konsolidasian Grup terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025 saldo akrual beban bunga dan utang bank masing-masing sebesar Rp22,48 milyar dan Rp173,21 milyar. Pada tahun 2025, Grup tidak melakukan pembayaran bunga secara rutin setiap bulan kepada Bank Capital sehingga melanggar syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Grup dan kami tidak memperoleh balasan konfirmasi atas utang bank, serta kami tidak dapat menerapkan prosedur audit lainnya untuk meyakinkan kami atas jumlah,

State Administrative Court No. 224/GI20221PTUN JKT dated 31 January 2023. On 22 February 2023 the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM) (Defendant/Appellant), has uploaded/uploaded the Memorandum of Appeal No: 224/G/20221PTUN-JKT via the case information system (E-Court), which was verified on February 23 2023.

Based on Decision No. 1791B12023/PT.TUN.JKT dated 23 August 2023, it was decided to accept the appeal request from the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia and cancel the Decision of the Jakarta State Administrative Court No.224/GI20221PTUN-JKT January 31,2023.

On February 19, 2024, the Group submitted a judicial review to the Supreme Court regarding the decision of the Jakarta State Administrative Court No. 1791B/2023IPT.TUN.JKT dated 23 August 2023 as an effort to regain the OS Mining Business License (IUP) which has been revoked.

As of the issuance of the Group's consolidated financial statements, legal action for Judicial Review is still in process, so we cannot obtain sufficient information and sufficient evidence to be confident using other alternative procedures regarding the recoverable amount of the exploration and evaluation assets and goodwill. As a result, we cannot determine whether adjustments are necessary to the balance of exploration and evaluation assets and goodwill.

- b. *As disclosed in note 11 to the accompanying consolidated financial statements, the Supreme Court rejected the cassation application regarding the seizure of PT Ricobana Abadi (RBA) assets and in addition, we did not conduct physical observation of fixed assets so that we cannot determine the impact of the adjustment and establishment of the necessary impairment reserves on the consolidated financial statements.*
- c. *As disclosed in Notes 16 and 20 to the accompanying consolidated financial statements of the Group, as of 31 December 2025 the accrued balance of interest expense and bank loan was Rp22.48 billion and Rp173.21 billion, respectively. In 2025, the Group did not make regular monthly interest payments to Bank Capital, thereby violating the terms and conditions that must be fulfilled by the Group and we did not receive a confirmation reply for the bank loan, and we were unable to apply other audit procedures to assure us of the amount, completeness and records of the bank loan. As a*

kelengkapan dan catatan utang bank tersebut. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap saldo akrual beban bunga dan utang bank tersebut.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Kami menarik perhatian ke Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup telah mengalami kerugian berulang dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mencatat kerugian komprehensif sebesar Rp18,45 milyar, yang mengakibatkan akumulasi defisit sebesar Rp1,51 triliun dan pada tanggal tersebut total liabilitas jangka pendek Grup telah melebihi total aset lancarnya sebesar Rp598,94 milyar. Kondisi ini bersama dengan hal-hal lain sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 33, menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan konsolidasian disusun atas dasar kelangsungan usaha, yang mengasumsikan bahwa Grup akan terus melanjutkan usahanya. Rencana manajemen sehubungan dengan hal tersebut juga dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk penyesuaian yang timbul dari ketidakpastian ini. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian ke Catatan 19 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir. Grup mencatat saldo Medium Term Notes pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp379.05 milyar dan telah jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022. Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan telah mengajukan perpanjangan masa 90 hari masa remedy sejak tanggal 13 September 2023 melalui Surat NO.059/RBA-OIRIIX/2023 mengenai masa penangguhan pembayaran MTN I Ricobana Abadi 2017 ("MTN I") sebagai upaya dari rencana struktur restrukturisasi MTN. Sampai dengan laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan upaya restrukturisasi MTN tersebut masih dalam proses. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

result, we cannot determine whether adjustments are needed to the accrued balance of interest expense and bank loan.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Material Uncertainty Related to Going Concern

We draw attention to Note 33 to the accompanying consolidated financial statements, the Group has experienced recurring losses where for the year ended 31 December 2025 it recorded a comprehensive loss of Rp18.45 billion, which resulted in an accumulated deficit of Rp1.51 trillion and at that date the total The Group's short-term liabilities have exceeded its total current assets of Rp598.94 billion. This condition, together with other matters as disclosed in Note 33, indicates the existence of material uncertainty that could raise significant doubts about the Group's ability to continue as a going concern. The consolidated financial statements are prepared on a going concern basis, which assumes that the Group will continue as a going concern. Management's plans in this regard are also explained in Note 33 to the consolidated financial statements. The consolidated financial statements do not include adjustments arising from these uncertainties. Our opinion is not modified in respect to such matters.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 19 to the accompanying consolidated financial statements, the Group recorded a balance of Medium Term Notes as of December 31, 2025 of Rp379.05 billion and has matured on December 20, 2022. On December 1, 2023, the Company has submitted a 90-day extension of the remedy period since September 13, 2023 through Letter NO.059/RBA-OIRIIX/2023 regarding the suspension of payment of MTN I Ricobana Abadi 2017 ("MTN I") as an effort of the MTN restructuring structure plan. As of the publication of these consolidated financial statements, MTN restructuring efforts are still in progress. Our opinion is not modified in this regard.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Selain hal-hal yang telah diuraikan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian dan paragraf Ketidakpastian Material yang terkait dengan Kelangsungan Usaha, kami telah menentukan hal-hal yang diuraikan di bawah ini sebagai hal audit utama yang dikomunikasikan dalam laporan kami.

Pengakuan pendapatan

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah pendapatan adalah sebesar Rp59,80 milyar. Kami fokus pada area ini karena berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons masalah audit utama di atas:

- Kami memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal.
- Kami mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan, memperoleh daftar pendapatan dan menguji secara sampel ke bukti-bukti pendukung,
- Kami menguji keakuratan perhitungan matematis dan menguji pisah batas.
- Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian PT SMR Utama, Tbk dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 24 April 2025 berisi opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Key Audit Matters

Key audit matters are matters which in our professional judgment, are the most significant matters in our audit of the current period's consolidated financial statements. These matters were presented in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion on the related consolidated financial statements, we did not express a separate opinion on the key audit matters. In addition to the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph and Material Uncertainty Related to Going Concern paragraph, we have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Revenue recognition

As disclosed in Note 25 to the accompanying consolidated financial statements, as of December 31, 2025, the total revenue was Rp59.80 billion. We focus on this area because it has a significant impact on the consolidated financial statements.

We performed the following audit procedures to address the above key audit matter:

- *We obtained an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal control.*
- *We evaluated the appropriateness of the accounting policies used, obtained a schedule of revenue and tested a sample of supporting evidence.*
- *We tested the accuracy of mathematical calculations and tested cutoffs*
- *We evaluated the adequacy of disclosures presented in the notes to the financial statements.*

Other Matter

The consolidated financial statements of PT SMR Utama, Tbk and its subsidiary for the year ended December 31, 2024, were audited by other independent auditor whose report dated April 24, 2025, expressed a qualified opinion on such consolidated financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL



Azwir Zamrinurdin, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP.0977/ Public Accountant License No. AP.0977

12 Mei 2026/May 12, 2026



00063

PT SMR UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS WITH
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

DAFTAR ISI/
TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statements
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 - 57	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>
INFORMASI TAMBAHAN - LAMPIRAN		SUPPLEMENTARY INFORMATION - APPENDIX
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	I	<i>Statements of Financial Position - Parent Entity</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Entitas Induk	II	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Entity</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	III	<i>Statements of Changes in Equity - Parent Entity</i>
Laporan Arus Kas Entitas Induk	IV	<i>Statements of Cash Flows - Parent Entity</i>

**PT SMR UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SMR UTAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	4	5.508.445.360	13.304.511.358	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - neto				Trade receivables - net
Pihak ketiga	5	15.486.838.232	4.988.615.596	Third parties
Pihak berelasi	5, 29	-	-	Relates parties
Piutang lain-lain - neto				Other receivables - net
Pihak ketiga	6	366.760.561	835.200.145	Third parties
Pihak berelasi	6, 29	500.000.000	500.000.000	Relates parties
Persediaan	7	6.502.026.260	6.944.571.600	Inventories
Uang muka	8	729.029.403	1.261.787.584	Advances
Biaya dibayar dimuka	9	10.659.151	233.433.449	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	18a	59.482.500	17.551.899.600	Prepaid taxes
Jumlah aset lancar		29.163.241.467	45.620.019.332	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Estimasi klaim pengembalian pajak	18a	3.237.716.218	9.658.330.947	Estimated claims for refundable taxes
Investasi pada entitas asosiasi	10	-	-	Investment in associates
Aset tetap - neto	11	90.686.827.934	158.716.315.485	Fixed assets - net
Aset tak berwujud - neto	12	215.426.407.358	215.426.407.358	Intangible assets - net
Aset eksplorasi dan evaluasi	13	272.756.441.315	272.756.441.315	Exploration and evaluation assets
Aset pajak tangguhan	18d	38.864.866.113	-	Deferred tax assets
Aset lainnya	14	450.000.000	450.000.000	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		621.422.258.938	657.007.495.105	Total non-current assets
JUMLAH ASET		650.585.500.405	702.627.514.437	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek				Short-term liabilities
Utang usaha	15	44.452.614.093	48.800.914.278	Trade payables
Utang pajak	18b	4.761.381.318	3.006.331.328	Taxes payable
Beban akrual	16	22.877.828.978	28.997.981.358	Accrued expenses
Utang lain-lain				Others payables
Pihak ketiga	17	3.691.188.152	11.049.698.908	Third parties
Medium term notes	19	379.052.500.000	379.052.500.000	Medium term notes
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	20	173.210.733.675	166.811.576.550	Bank loans
Liabilitas sewa	21	58.983.754	1.242.883.349	Lease liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		628.105.229.970	638.961.885.771	Total short-term liabilities
Liabilitas jangka panjang				Long-term liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa	21	-	83.682.356	Lease liabilities
Utang lain-lain				Other payables
Pihak ketiga		704.986.920	704.986.920	Third parties
Pihak berelasi	29	-	491.263.618	Related parties
Liabilitas pajak tangguhan - neto	18d	-	21.433.943.918	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas imbalan kerja	22	20.887.027.008	21.610.320.598	Employment benefits liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		21.592.013.928	44.324.197.410	Total long-term liabilities
JUMLAH LIABILITAS		649.697.243.898	683.286.083.181	TOTAL LIABILITIES

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

	Catatan/ Notes	2025	2024	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent company
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - par value
Rp100 per saham				Rp100 per shares
Modal dasar - 48.000.000.000 saham				Authorized capital - 48,000,000,000 shares. Issued and fully paid
Modal ditempatkan dan disetor 12.499.385.782 saham	23	1.249.938.578.200	1.249.938.578.200	12,499,385,782 shares
Tambahan modal disetor - neto	24	259.878.346.851	259.878.346.851	Additional paid-in capital - net
Selisih nilai atas transaksi dengan pihak nonpengendali		(15.523.435)	(15.523.435)	Difference in value from transactions with non-controlling interest
Defisit		(1.509.246.499.832)	(1.489.985.418.071)	Deficits
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		554.901.784	19.815.983.545	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non pengendali		333.354.723	(474.552.289)	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		888.256.507	19.341.431.256	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		650.585.500.405	702.627.514.437	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT SMR UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SMR UTAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN	25	59.804.051.122	80.114.927.685	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	26	(114.780.894.168)	(153.430.944.490)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		(54.976.843.046)	(73.316.016.805)	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	27	(25.206.200.730)	(30.380.351.962)	General and administrative expenses
Pendapatan (beban) usaha lain-neto	28	(1.747.979.256)	8.314.418.096	Other operating (income) expense
RUGI USAHA		(81.931.023.032)	(95.381.950.671)	LOSS ON OPERATIONS
Beban keuangan		(66.360.367)	(2.450.716.645)	Financial expense
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(81.997.383.399)	(97.832.667.316)	LOSS BEFORE TAX BENEFIT
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	18c	61.012.797.727	5.674.679.555	INCOME TAX BENEFIT - NET
RUGI NETO TAHUN BERJALAN		(20.984.585.672)	(92.157.987.761)	NET LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	22	3.245.398.619	181.173.970	Remeasurement post-employment benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait	18d	(713.987.696)	(39.858.273)	Related income tax
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain		2.531.410.923	141.315.697	Total other comprehensive income (loss)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(18.453.174.749)	(92.016.672.064)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		(20.983.980.077)	(92.157.182.624)	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		(605.595)	(805.137)	Non-controlling interests
Rugi bersih tahun berjalan		(20.984.585.672)	(92.157.987.761)	Loss for the year
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		(18.452.550.003)	(92.015.868.227)	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		(624.746)	(803.837)	Non-controlling interests
Rugi komprehensif tahun berjalan		(18.453.174.749)	(92.016.672.064)	Comprehensive loss for the year
RUGI PER SAHAM DASAR		(1,68)	(7,37)	BASIC LOSS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the parent entity							
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - neto/ Additional paid-in capital - net	Selisih nilai atas transaksi dengan pihak nonpengendali/ Difference in value from transactions with non-controlling interest	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo per 31 Desember 2023	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(15.523.435)	(1.397.969.569.584)	111.831.832.032	(473.556.400)	111.358.275.632	Balance as of December 31, 2023
Penyesuaian	-	-	-	19.740	19.740	(192.052)	(172.312)	Adjustment
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(92.157.182.624)	(92.157.182.624)	(805.137)	(92.157.987.761)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	141.314.397	141.314.397	1.300	141.315.697	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2024	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(15.523.435)	(1.489.985.418.071)	19.815.983.545	(474.552.289)	19.341.431.256	Balance as of December 31, 2024
Penyesuaian	-	-	-	(808.531.758)	(808.531.758)	808.531.758	-	Adjustment
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(20.983.980.077)	(20.983.980.077)	(605.595)	(20.984.585.672)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	2.531.430.074	2.531.430.074	(19.151)	2.531.410.923	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2025	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(15.523.435)	(1.509.246.499.832)	554.901.784	333.354.723	888.256.507	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

PT SMR UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SMR UTAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
ARUS KAS DARI			CASH FLOW FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	49.305.828.486	76.966.624.612	<i>Receipts from customers</i>
Pembayaran kepada karyawan	(38.200.344.970)	(40.056.909.407)	<i>Payment to employees</i>
Pembayaran kepada pemasok			<i>Payments to suppliers</i>
dan kegiatan operasi lainnya	(21.877.558.904)	(61.209.867.379)	<i>and other operating activities</i>
Pembayaran bunga	(66.360.367)	(2.450.716.645)	<i>Interest paid</i>
Penerimaan bunga	51.874.771	29.807.005	<i>Interest received</i>
Kas bersih digunakan untuk			Net cash used in
aktivitas operasi	<u>(10.786.560.984)</u>	<u>(26.721.061.814)</u>	operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOW FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(78.860.000)	(232.700.000)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Hasil penjualan aset tetap	4.336.936.937	39.952.496.669	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Kas bersih diperoleh dari			Net cash provided by
aktivitas investasi	<u>4.258.076.937</u>	<u>39.719.796.669</u>	investing activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOW FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Liabilitas sewa	(1.267.581.951)	(10.529.661.990)	<i>Lease liabilities</i>
Kas bersih digunakan untuk			Net cash used in
aktivitas pendanaan	<u>(1.267.581.951)</u>	<u>(10.529.661.990)</u>	financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH			NET INCREASE (DECREASE) IN
KAS DAN SETARA KAS	(7.796.065.998)	2.469.072.865	CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
AWAL TAHUN	<u>13.304.511.358</u>	<u>10.835.438.493</u>	THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
AKHIR TAHUN	<u>5.508.445.360</u>	<u>13.304.511.358</u>	THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT SMR Utama Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Dwi Satria Jaya berdasarkan Akta Notaris F. Eka Sumarningsih, S.H., M.H., No. 31 tanggal 11 November 2003. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C 28091HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 November 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43, Tambahan No. 5091 tanggal 28 Mei 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 24 oleh Notaris Miryany Usman S.H., tanggal 29 Juli 2022 tentang Perubahan Direksi dan tempat kedudukan Perusahaan. Akta tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0061404.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan dan pembangunan. Saat ini, selain menjalankan fungsi sebagai perusahaan induk (holding company), Perusahaan tidak aktif terlibat dalam bisnis apapun. Perusahaan berkedudukan di Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, Jakarta Utara, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) adalah entitas induk dan entitas induk terakhir dari Perusahaan.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025	
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Wijaya Mulia
Komisaris Independen	Andi Ruswandi
<u>Direksi</u>	
Komisaris Utama	Gani Bustan
Komisaris Independen	Hendrik Frederick S

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT SMR Utama Tbk (the "Company") was established under the name PT Dwi Satria Jaya based on Notarial Deed No. 31 dated November 11, 2003, drawn up before F. Eka Sumarningsih, S.H., M.H., Notary. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. C-28091 HT.01.01.TH.2003 dated November 21, 2003, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 43, Supplement No. 5091 dated May 28, 2004. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 24 dated July 29, 2022, drawn up before Miryany Usman, S.H., Notary, regarding changes in the Board of Directors and the Company's domicile. The amendment was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0061404.AH.01.02 Tahun 2022 dated August 30, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities includes trading, services, industry, transportation, workshop services, and construction. Currently, aside from performing its function as a holding company, the Company is not actively engaged in any business operations. The Company is domiciled at Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, North Jakarta, Indonesia.

As of December 31, 2025 and 2024, PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) is the parent entity and the ultimate parent entity of the Company.

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2024	
<u>Board of Commissioners</u>	
Wijaya Mulia	President Commissioner
Andi Ruswandi	Independent Commissioner
<u>Board of Directors</u>	
Gani Bustan	President Commissioner
Hendrik Frederick S	Independent Commissioner

Susunan Anggota Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Andi Ruswandi
Anggota	Lena
Anggota	Dasep Herdianto

Sekretaris Perusahaan	Arief Novaldi
-----------------------	---------------

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki masing-masing 189 dan 172 karyawan tetap (tidak di audit).

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-107/0/BL/2011 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham sejumlah 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham tersebut ditawarkan pada harga sebesar Rp 600 per saham.

Tindakan Perusahaan (corporate action) yang mempengaruhi efek yang diterbitkan sejak penawaran umum perdana sampai dengan laporan akhir tahun terbaru adalah Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pada tanggal 26 Juni 2014, Perusahaan telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-307/D.04/2014 dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan PUT I sejumlah 10.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan sebanyak 500.000.000 Waran Seri I (WS I). Sebagai insentif kepada para pemegang saham, melekat satu WS I pada setiap 21 saham baru hasil HMETD. Masing-masing WS I berhak untuk membeli saham baru Perusahaan dengan harga pelaksanaan Rp 150 per saham, dengan jumlah nilai pelaksanaan WS I adalah sebanyak-banyaknya Rp 75.000.000.000. Periode pelaksanaan WS I adalah 14 Januari hingga 13 Juli 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saham Perusahaan yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 12.499.385.782 saham.

Penangguhan dari Bursa Efek Indonesia

Modal saham Perusahaan ditangguhkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia setelah menerima surat permintaan klarifikasi dari Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam Surat No. S-00467/BEI.PP2/01-2020 tanggal 22 Januari 2020. Surat dari BEI adalah untuk meminta klarifikasi sehubungan dengan penetapan Heru Hidayat, Presiden Komisaris dari PT Trada Alam Minera Tbk (Entitas Induk), sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Members of the Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	<u>Audit Committee</u>
Andi Ruswandi	Chairman
Lena	Member
Dasep Herdianto	Member

Arief Novaldi	Corporate Secretary
---------------	---------------------

As at 31 December 2025 and 2024, the Company and its subsidiaries, had 189 and 172 permanent employees, respectively (unaudited).

c. Public Offering of Shares of Company

On September 30, 2011, the Company obtained Effective Statement Letter No. S-107/0/BL/2011 from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("Bapepam-LK") to conduct an initial public offering of 500,000,000 shares with par value of Rp 100 per share to public through the Indonesia Stock Exchange ("IDX"). The shares were offered at a price of Rp 600 per share.

The Company's corporate action from the date of its initial public offering up to the latest reporting year-end is the Limited Public Offering I ("PUT I") to the shareholders in relation to issuance of right issue with Pre-emptive Rights ("HMETD"). On June 26, 2014, the Company obtained Effective Statement Letter No. S 307/D.04/2014 from Indonesia Financial Services Authority ("OJK") to conduct PUT I of 10,500,000,000 shares with par value of Rp 100 per share and 500,000,000 Series I Warrants ("WS I"). As an incentive to its shareholders, attached is one WS I for every 21 shares issued through HMETD. Each WS I gives the shareholder the right to purchase the Company's shares at exercise price of Rp 150 per share, with total exercise price is maximum of Rp 75,000,000,000. The exercise period of WS I is from January 14 to July 13, 2015.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company's shares totaling to 12,499,385,782 shares, respectively, were listed in the Indonesian Stock Exchange.

Suspension from Bursa Efek Indonesia

The Company's capital shares were suspended for trading in Indonesian Stock Exchange upon receipt of the request letter for clarification from Bursa Efek Indonesia ("BEI") in its Letter No. S-00467/BEI.PP2/01-2020 dated January 22, 2020. The letter from BEI is to seek clarification in connection with the determination of Heru Hidayat, the President Commissioner of PT Trada Alam Minera Tbk (Parent Entity), as a suspect in the Jiwasraya case.

Sebelumnya, Perusahaan juga menerima surat yang sama dari OJK untuk meminta klarifikasi tentang keterlibatan Heru Hidayat dengan Perusahaan dan hubungan Perusahaan dengan kasus Jiwasraya melalui Surat No. S-76/PM.222/2020 tanggal 15 Januari 2020. Isi surat tersebut adalah untuk meminta klarifikasi tentang dampak dan rencana Perusahaan jika Heru Hidayat terbukti bersalah.

Meskipun manajemen telah menilai dan menanggapi kepada BEI bahwa tidak ada dampak kasus Jiwasraya terhadap operasi Perusahaan dan akan beroperasi seperti biasa bahkan jika Heru Hidayat terbukti bersalah, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, penangguhan dari BEI belum dicabut.

On an earlier date, the Company received the same letter from OJK seeking clarification regarding the involvement of Heru Hidayat to the Company and Company's relation to the Jiwasraya case through its Letter No. S-76/PM.222/2020 dated January 15, 2020. It also seek clarification on the impact and plans of the Company incase Heru Hidayat is proven guilty.

Although the management has assessed and responded to BEI that there is no impact of the Jiwasraya case to the Company's operation and will operate as usual even if Heru Hidayat is proven guilty, suspension of the Company from BEI as of the completion date of the consolidated financial statement has not been lifted.

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, informasi mengenai entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiary	Dimisili/ Domicile	Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Bidang utama usaha/ Main business activity
<u>Kepemilikan langsung / Direct ownership</u>			
PT Adibrata Cipta			
Pertiwi (ACP)	Jakarta	*)	Investasi/ Investing
PT Adikarsa Alam			
Resources (AKAR)	Jakarta	*)	Perdagangan/ Trading
<u>Kepemilikan tidak langsung / Indirect ownership</u>			
PT Ricobana Abadi			
(RBA)	Jakarta	1981	Kontraktor batubara/ Mining contractor
(melalui ACP/ through ACP)			
PT Troposfir			
Pancar Sejati (TPS)	Jakarta	*)	Investasi/ Investing
(melalui RBA/ through RBA)			
PT Traposfir			
Mega Raya (TMR)	Jakarta	*)	Investasi/ Investing
(melalui TPS/ through TPS)			
PT Delta Samudra (DS)			
(melalui TMR/ through TMR)	Jakarta	*)	Pertambangan/ Mining

*) Belum beroperasi secara komersial / has not started commercial operations

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

d. Subsidiaries

As of December 31, 2025 and 2024, information of subsidiary which consolidated into the Company's financial statements are as follows:

Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total asset before elimination	
2025	2024	2025	2024
99,99%	99,99%	1.226.033.223.936	1.226.033.441.697
99,91%	99,91%	31.104.348	31.639.348
99,99%	99,99%	520.610.950.132	599.494.113.230
98,72%	98,72%	46.451.116.327	46.442.225.365
99,77%	99,77%	45.993.764.966	45.994.274.966
99,99%	99,99%	28.103.075.834	28.103.579.608

In this consolidated financial statements, the Company and subsidiary are referred to as the "Group".

e. Area eksplorasi / pengembangan

PT Delta Samudra ("DS"), entitas anak, memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan izin usaha pertambangan operasi produksi ("IUP-OP") No. 545/K.835/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama PT Delta Samudra yang berlaku selama 22 tahun.

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP") adalah sebesar 9.384 hektar dimana 7.489 hektar yang berada dalam kawasan Hutan Produksi dan hutan Produksi Terbatas.

Berdasarkan rencana kerja tambang, pertimbangan teknis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang dapat digunakan untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") adalah 7.377,7 hektar. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, PT Delta Samudra (DS) sedang dalam proses permohonan IPPKH atas kawasan tersebut. Area tersebut terletak di Desa Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Laporan Eksekutif Review dan Verifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara oleh ahli yang independen dan kompeten melalui nomor laporan 001/DE_PTDS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014, estimasi jumlah cadangan terbukti dan terkira yang dimiliki PT Delta Samudra (DS) adalah sebesar 43.473.546 ton.

Pada tanggal 15 Februari 2022, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") telah menerbitkan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") PT Delta Samudra (DS).

e. Exploration/ development area

PT Delta Samudra ("DS"), as a subsidiary, operates exploration and exploitation areas based on mining business permit for production operation ("IUP-OP") No. 545/K.835/2009 dated 16 October 2009 in the name of PT Delta Samudra which is valid for 22 years.

The size of the mining licence area ("WIUP") is 9,384 hectares of which 7,489 hectares are in the area of Production Forest and Limited Production Forest.

Based on the mine work plan, technical considerations of the East Kalimantan Provincial Mining and Energy Office and recommendations given by the Governor of East Kalimantan, the area that can be used for the Borrow-to-Use Forest Area Licence ("IPPKH") is 7,377.7 hectares. Up to the date of completion of the consolidated financial statements, PT Delta Samudra (DS) is in the process of applying for IPPKH for the area. The area is located in Lingau Village, Nyuatan District, West Kutai Regency, East Kalimantan Province.

Based on the Review and Verification of Coal Resources and Reserves Executive Report by an independent and competent expert through report number 001/DE_PTDS/VI/2014 dated 13 June 2014, the estimated amount of estimated reserves owned by PT Delta Samudra ("DS") is 43,473,546 metric tonnes.

On 15 February 2022, the Ministry of Investment/ Investment Coordinating Board ("BKPM") issued a letter revoking the Mining Business Permit ("IUP") of PT Delta Samudra (DS).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance

These consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) and the related OJK regulations particularly Rule No. VIII.G.7 on "Presentation and Disclosures for Financial Statements of Public Company".

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas konsolidasian ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025:

- PSAK 117: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

d. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan, selaku entitas induk, dan entitas anak, sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup dan pengendalian tersebut timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk tiap transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas entitas anak namun tanpa kehilangan pengendalian adalah transaksi ekuitas dan disajikan dalam akun "Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali" pada ekuitas.

b. Basis of measurement and preparation of consolidated financial statements

The measurement basis used in the financial statement is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The consolidated statement of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Functional and presentation currency used in the preparation of these consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah.

c. Changes in accounting policies

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2025:

- SFAS 117: "Insurance Contract";
- Amendment of SFAS 117: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comparative Information; and
- Amendment of SFAS 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to conditions when a currency is not exchangeable.

The adoption of this revised PSAK does not result in changes to the Group accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

d. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise of the financial statements of the Company, as parent entity, and its subsidiaries, as a single economic entity. Subsidiaries is an entity which is controlled by the Group and such control exist when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over subsidiary.

Subsidiary is consolidated from the acquisition date, being the date when the Group obtains control, until the date when the Group's control ceases. The consolidated financial statements are prepared using the same accounting policies for each transaction and other events in similar circumstances.

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are an equity transaction and presented as "Difference in Transaction with Non-controlling Parties" in equity.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Grup pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill* dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat Kepentingan Nonpengendali (KNP);
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- mereklasifikasi bagian Grup atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba; dan
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada Perusahaan sebagai entitas induk.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan kontinjensi. Beban akuisisi terkait dibebankan pada saat terjadinya.

Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pada akuisisi bertahap, Grup mengakui kepentingan nonpengendali sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Pada akuisisi bertahap, Kelompok Usaha mengakui kepentingan nonpengendali sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi yang melebihi nilai wajar bagian Kelompok Usaha atas aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai goodwill.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan ke setiap unit penghasil kas dari Kelompok Usaha yang diharapkan bermanfaat untuk kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan ke unit-unit tersebut.

If the Group lose control of a subsidiary on the date of loss of control, the Group shall:

- *derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;*
- *derecognize the carrying amount of any Non-controlling Interest (NCI);*
- *recognize the fair value of the consideration received and distribution of shares (if any);*
- *recognize the fair value of any investment retained;*
- *reclassify the Group's portion on the components that previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate; and*
- *recognize any resulting difference as gain or loss in profit or loss attributable to the Company, as parent entity.*

The Group applies the acquisition method of accounting for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of assets transferred, liabilities assumed and equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of assets or liabilities arising from contingent consideration. Related acquisition expenses are expensed as incurred.

Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at fair value at the acquisition date. In phased acquisitions, the Group recognises non-controlling interests at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the net assets of the acquiree.

In a phased acquisition, the Group recognises non-controlling interests at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the net assets of the acquiree.

The excess of the aggregate of the consideration transferred, the amount of non-controlling interests in the acquiree, and the fair value at the acquisition date of previous equity interests in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recognised as goodwill.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

Jika goodwill yang telah dialokasikan pada suatu unit penghasil kas dan bagian operasi atas unit tersebut dilepas, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat operasi ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepas dalam keadaan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi unit penghasil kas yang ditahan.

If goodwill that has been allocated to a cash-generating unit and the operating portion of that unit is disposed of, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. Goodwill disposed of in such circumstances is measured based on the relative values of the disposed operation and the retained portion of the cash-generating unit.

e. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi

KNP adalah bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Grup. KNP disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan, selaku entitas induk. Seluruh laba rugi dari setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

e. Transactions with related parties

NCI is a portion of subsidiary's equity which are not directly or indirectly attributable to the Company. NCI is presented in the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the equity section attributable to the Company, as the parent entity. All profit or loss and each component of other comprehensive income is attributed to the Company and NCI even if this results a deficit balance in NCI.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi dan diakui dalam aset dari transaksi intra kelompok usaha, dieliminasi secara penuh.

All assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group, including unrealized profit or losses that are recognized in assets and resulting from intra group transaction, are fully eliminated.

Sesuai dengan PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak dianggap berelasi dengan Grup jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) terhadap pihak lain dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasional.

In accordance with SFAS 224 regarding "Related Party Disclosures", parties are considered to be related with the Group if one party has the ability to control (through ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (through participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant balances and transactions with related parties have been disclosed in Notes to the consolidated financial statements.

f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

f. Foreign currency transactions and balances

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the date of the transaction. In the consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gain or losses from foreign exchanges are credited or charged to current profit or loss.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

As at the consolidated statements of financial position date, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows:

	2025	2024	
1 Dolar Amerika Serikat	16.782	16.162	1 US Dollar

g. Instrumen keuangan

Seluruh aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada pengakuan awal pada saat Grup menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Pada saat pengakuan awal, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan: (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), (iii) diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Aset keuangan Grup yang terdiri dari kas dan bank, piutang pembiayaan dan piutang lain-lain, serta liabilitas keuangan Grup yang terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain, dan utang bank diklasifikasikan sebagai "instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi".

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

h. Kas dan setara kas

Kas dan bank terdiri dari uang kas dan uang yang ada di bank dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Biaya eksplorasi dan evaluasi

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi melibatkan pencarian mineral, penentuan kelayakan teknis, dan penilaian kelayakan komersial dari sebuah sumber daya teridentifikasi. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. pengumpulan data eksplorasi melalui topografi, studi geokimia dan geofisika;
- b. pengeboran, penggalian dan sampel;
- c. menentukan dan memeriksa volume dan kualitas sumber daya; dan
- d. meneliti persyaratan transportasi dan infrastruktur.

Biaya administrasi yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu daerah eksplorasi khusus dibebankan pada laba rugi. Biaya lisensi yang dibayar sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di daerah eksplorasi yang ada dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu lisensi atau izin.

g. Financial instruments

All financial assets and financial liabilities are initially recognized when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

At initial recognition, there are three measurement classifications for financial assets: (i) amortized cost, (ii) fair value through other comprehensive income (FVOCI), (iii) fair value through profit or loss (FVTPL).

The Group's financial assets comprise cash and banks, financing receivables, and other accounts receivable, and the Group's financial liabilities comprise account payables, accrued expense, other payables and bank loans are classified as "financial instruments measured at amortized costs".

The Group recognises impairment loss provision for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for trade receivables are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

h. Cash and cash equivalent

Cash and banks consist of cash on hand and in banks and are not used as collateral of obligation and there is no restriction of the use.

i. Exploration and evaluation costs

Exploration and evaluation activities involve prospecting for minerals, determining the technical feasibility, and assessing the commercial viability of an identified resource. These activities include:

- a. exploration data collection through topography, geochemical and geophysical studies;
- b. drilling, excavation and samples;
- c. determining and checking the volume and quality of resources; and
- d. researching transport and infrastructure requirements.

Administrative costs that are not directly attributable to a specific exploration area are charged to profit or loss. Licence fees paid in respect of the right to explore in existing exploration areas are capitalised and amortised over the term of the licence or permit.

Biaya eksplorasi dan evaluasi (termasuk amortisasi atas biaya lisensi yang dikapitalisasi) dikapitalisasi pada saat terjadinya, kecuali dalam keadaan berikut:

- sebelum memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu;
- setelah dapat dibuktikan dengan kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral atau

Kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi dicatat dalam akun "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi penyisihan penurunan nilai. Aset tersebut tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan tetapi ditelaah untuk indikasi penurunan nilai.

Apabila suatu penurunan potensial terindikasi, penilaian dilakukan untuk setiap area of interest dalam kaitannya dengan kelompok aset operasi terkait (yang merupakan unit penghasil kas) terhadap eksplorasi yang terkait tersebut. Se jauh biaya eksplorasi dan evaluasi tidak diharapkan untuk dipulihkan, biaya tersebut dibebankan pada laba rugi.

Satu atau lebih fakta dan kondisi berikut mengindikasikan bahwa Perusahaan menguji apakah aset eksplorasi dan evaluasi mengalami penurunan nilai (tidak terbatas pada daftar berikut):

- Periode Perusahaan memiliki hak melakukan eksplorasi dan evaluasi dalam suatu wilayah tertentu telah kedaluarsa selama periode berjalan atau akan kedaluarsa dalam waktu dekat, dan diperkirakan tidak diperbaharui;
- Pengeluaran substantif untuk eksplorasi dan evaluasi tambang sumber daya mineral lebih lanjut dalam wilayah tertentu tidak dianggarkan atau direncanakan;
- Eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral dalam wilayah tertentu tidak menunjukkan penemuan yang memenuhi skala ekonomi pertambangan sumber daya mineral, dan Perusahaan telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral
- Arus kas terkait dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi dalam laporan arus kas, sedangkan arus kas terkait dengan biaya eksplorasi dan evaluasi yang dibiayai diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Pada saat cadangan terbukti telah ditentukan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke "Tambang dalam pembangunan", yang merupakan bagian dari "Properti Pertambangan". Semua biaya pengembangan setelah perolehan awal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang dikapitalisasi dan diklasifikasikan sebagai "Tambang dalam pembangunan". Biaya pengembangan merupakan hasil penjualan atas mineral yang diekstraksi selama tahap pengembangan.

Exploration and evaluation costs (including amortisation of capitalised licence fees) are capitalised as incurred. Licence fees) are capitalised as incurred, except in the following circumstances:

- before obtaining the legal right to explore a particular area;
- upon demonstration of the technical and commercial feasibility of mining mineral resources or the discovery

Capitalised exploration and evaluation costs are recorded under "Exploration and Evaluation Assets" and subsequently measured at cost less allowance for impairment. Such assets are not depreciated as they are not yet available for use but are reviewed for indications of impairment.

Where a potential impairment is indicated, an assessment is made for each area of interest in relation to the related group of operating assets (which are cash-generating units) to which the exploration relates. To the extent that exploration and evaluation costs are not expected to be recovered, they are charged to profit or loss.

One or more of the following facts and circumstances may indicate that the Company should test whether an exploration and evaluation asset is impaired (not limited to the following list):

- The period during which the Company has exploration and evaluation rights in a particular area has expired during the current period or will expire in the near future, and is not expected to be renewed;
- Substantial expenditure on further exploration and evaluation of mineral resource mines within a given area is not budgeted or planned;
- Exploration and evaluation on mineral resources mining in certain areas did not show discoveries that fulfil the economics of mineral resources mining, and the Company has decided to stop exploration and evaluation activities of mineral resources in these areas.
- Cash flows related to capitalised exploration and evaluation costs are classified as cash flows from investing activities in the statement of cash flows, while cash flows related to exploration and evaluation costs expensed are classified as operating activities.

When proven reserves are determined, exploration and evaluation assets are reclassified to "Mines under construction", which forms part of "Mining Properties". All development costs subsequent to initial acquisition relating to the construction of infrastructure required to operate the mine are capitalised and classified as "Mines under development". Development costs represent proceeds from the sale of minerals extracted during the development stage.

Pada saat pengembangan telah selesai, semua aset yang termasuk dalam "Tambang dalam pembangunan" diklasifikasikan ke "Tambang berproduksi" dalam properti pertambangan atau komponen lain dalam aset tetap. Tambang berproduksi dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Properti pertambangan mencakup aset dalam tahap produksi dan pengembangan, serta aset yang ditransfer dari aset eksplorasi dan evaluasi. Properti pertambangan dalam tahap pengembangan tidak diamortisasi sampai tahapan produksi dimulai.

Pada saat proyek konstruksi tambang bergerak ke tahap produksi, kapitalisasi atas konstruksi tambang tertentu dibebankan sebagai bagian dari biaya persediaan atau dibebankan, kecuali biaya yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan penambahan dan pengembangan aset pertambangan dan pengembangan cadangan ditambang.

Akumulasi biaya dari tambang yang telah berproduksi diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang cadangan tambang tersebut dapat dipulihkan secara ekonomis.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir periode pelaporan. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

When development is completed, all assets included in "Mines under construction" are classified to "Producing mines" within mining properties or other components of property, plant and equipment. Producing mines are carried at cost, less accumulated amortisation and impairment losses, if any.

Mining properties include assets in the production and development stages, as well as assets transferred from exploration and evaluation assets. Mining properties under development are not amortised until production commences.

As mine construction projects move into production, capitalisation of certain mine construction is expensed as part of the cost of inventories or expensed, except for costs that qualify for capitalisation relating to additions to and development of mining assets and development of mined reserves.

The accumulated costs of producing mines are amortised using the unit of production method to the extent that the reserves are economically recoverable.

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of inventories includes all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The cost is determined using the weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the reporting period. The amount of any allowance for impairment and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs.

The amount of any reversal of any allowance for write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

k. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi Grup pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup atau entitas anak mempunyai pengaruh signifikan, biasanya mempunyai kepemilikan saham 20% atau lebih dari hak suara entitas. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi termasuk goodwill yang teridentifikasi ditambah atau dikurang dengan bagian Grup atas laba atau rugi bersih, penerimaan dividen dari investee dan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai sejak tanggal perolehan. Jika bagian atas Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Laba rugi mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi di eliminasi sesuai dengan jumlah kepentingan Grup dalam entitas asosiasi. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi, disesuaikan jika diperlukan, untuk menjamin konsistensi kebijakan akuntansi dengan yang digunakan oleh Grup.

l. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

k. Investment in associates

The Group's investment in associate is accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Group or its Subsidiaries have significant influence, generally accompanying a shareholding of 20% or more of the voting power of the entity. Under the equity method, the cost of investment includes goodwill identified on acquisition, increased or decreased by the Group's share of profit or loss of the associate, and dividends received from the investee, net of any impairment loss since the date of acquisition. When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

The profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. When there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains or losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

l. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

m. Fixed assets

Fixed assets are initially recorded at cost which includes the purchase price, borrowing costs and other costs directly attributable to bring the asset to the present location and condition. Cost also includes the cost of replacing part of property and equipment if the recognition criteria are met. Subsequent to initial recognition, the Group uses cost model in which property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any). All costs of maintenance and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Penyusutan dihitung sejak aset tetap siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

	Tahun / Years	
Kendaraan	4 - 8	Vehicle
Komputer	4	Computer
Peralatan kantor	4	Office equipment

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Depreciation begins when the fixed assets are ready for used using straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Depreciation does not be ceased when the asset becomes idle or retired from active use unless the asset is fully depreciated.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method of fixed assets are reviewed at each year end with the effect of any changes accounted for as change in accounting estimates which recognize on a prospective basis.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (accounted as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed asset) is recognized in profit or loss in the year of derecognition.

n. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas [UPK]). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai kemudian ditelaah untuk kemungkinan pembalikan atas penurunan nilai pada tiap tanggal pelaporan.

n. Impairment of non-financial assets

Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units [CGU]). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

o. Aset takberwujud

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset takberwujud Grup terdiri dari goodwill, hubungan pelanggan dan piranti lunak komputer.

Goodwill

Lihat Catatan 3d untuk kebijakan akuntansi terkait goodwill. Goodwill tersebut muncul atas akuisisi entitas anak.

Hubungan terkait pelanggan

Hubungan terkait pelanggan yang diperoleh secara terpisah disajikan sebesar biaya perolehan. Hubungan terkait pelanggan yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan terkait pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya perolehan hubungan terkait pelanggan selama estimasi masa manfaatnya 5 tahun.

Piranti lunak komputer

Aset takberwujud berupa perangkat lunak komputer yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras. Aset takberwujud dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya dari 4 tahun.

Biaya perolehan perangkat lunak komputer untuk penggunaan internal dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset takberwujud jika biaya bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait. Akumulasi biaya tersebut diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat 4 tahun yang diharapkan ketika perangkat lunak komputer secara substantif siap untuk digunakan.

Taksiran masa manfaat dan metode amortisasi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku secara prospektif.

o. Intangible assets

Intangible assets are recognised if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Group will obtain future economic benefits from the asset. Intangible assets of the Group consist of goodwill, customer relationships and computer software.

Goodwill

Refer to Note 3d for the accounting policies of goodwill. The goodwill arises from the acquisition of a subsidiary.

Customer relationships

Separately acquired customer relationships are shown at historical cost. Customer relationships acquired in a business combination are recognized at fair value at acquisition date. Customer relationships have a finite useful life and carried at cost less accumulated amortization.

Amortization is calculated using the straight line method to allocate the cost of customer relationships over its estimated useful lives of 5 years.

Computer software

Intangible assets are computer software that is not an integral part of the hardware. Intangible assets are stated at cost and amortized using the straight-line method over their estimated useful lives of 4 years.

The cost of computer software for internal use is capitalized and recorded as an intangible asset if the cost is not an integral part of the related hardware. The accumulated cost is amortized using the straight-line method over the expected useful life of 4 years when the computer software is substantively ready for use.

The estimated useful life and amortization method are reviewed at the end of each reporting period with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

p. Sewa

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

p. Leases

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group's incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

q. Liabilitas imbalan pascakerja

Grup mengakui imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013, Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021. Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja tersebut didasarkan pada metode aktuarial Projected Unit Credit setelah memperhitungkan kontribusi yang dibuat oleh Perusahaan terkait dengan program (jika ada).

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti serta penyesuaian atas biaya jasa lalu. Grup mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Grup menerapkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

s. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

q. Post-employment benefits liabilities

The Group recognizes post-employment benefits for employees in accordance with Labor Law No. 13/2003, the Omnibus Law on Job Creation No. 11 Year 2020 and "Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021. The calculation of post-employment benefits liabilities is based on the actuarial Projected Unit Credit method after considering the contribution made by the Company to such program (if exist).

The amount recognized as post-employment benefits liabilities in the statement of financial position represents the present value of defined benefit obligation and the adjustment for past service costs. The Group recognized all actuarial gains or losses through other comprehensive income.

r. Revenue and expense recognition

The Group applies 5 (five) step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Revenue from the sale of goods is recognized when the control of goods has been transferred to the customer. Revenue from the rendering of service is recognized when the customer has received and consumed benefit from the services.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

s. Income tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current tax asset (liability), which is determined by the amount of the expected refund from (or payable to) the tax authorities, is calculated using tax rates (and tax laws) that have been enacted at the consolidated statements of financial position date.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Current income tax is recognized upon taxable income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amount for reporting purposes at the end of the reporting period.

Deferred tax is recognized on taxable income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, carry forward of unused tax credits and unused tax losses, to the extent that can be utilized. The carrying amount of deferred tax assets are reviewed at each end of the reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.

Deferred tax is recognized on taxable income in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

t. Informasi segmen

Segmen usaha dilaporkan dengan cara yang sesuai dengan pelaporan internal yang dipersiapkan untuk pembuat keputusan operasional. Pembuat keputusan operasi adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

t. Segment Information

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intra-group transactions are eliminated.

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian berikut ini dibuat dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup adalah klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK 109, "Instrumen Keuangan". Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan memiliki dampak perlakuan akuntansi yang berbeda.

Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Keadaan dan asumsi mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of income, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of reporting period. The uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcome that required a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in the future period.

Judgments made in the application of accounting

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements is classification of financial assets and liabilities.

The Group classifies its financial assets and liabilities in accordance with the requirement under PSAK 109, "Financial Instruments". Each category of financial assets and liabilities has difference impacts on the accounting.

Assumption and key sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Penyusutan aset tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 8 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan dan amortisasi masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi. Jumlah tercatat aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan dalam Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi mengakibatkan biaya tertentu dikapitalisasi untuk sebuah area of interest yang dianggap dapat dipulihkan oleh eksploitasi di masa depan atau penjualan atau dimana kegiatan tambang belum mencapai tahap tertentu yang memungkinkan dilakukan penilaian yang wajar atas keberadaan cadangan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu atas peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi eksploitasi dapat dilaksanakan secara ekonomis.

Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika, setelah dilakukan kapitalisasi atas biaya berdasarkan kebijakan ini, suatu pertimbangan dibuat bahwa pemulihan biaya dianggap tidak dimungkinkan, biaya yang telah dikapitalisasi tersebut akan dibebankan ke dalam laba rugi.

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Pertimbangan diterapkan oleh manajemen dalam menentukan kelayakan suatu proyek secara ekonomis. Dalam melakukan pertimbangan ini, manajemen perlu membuat estimasi dan asumsi tertentu yang serupa dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi yang dijelaskan di atas.

Depreciation of fixed assets

Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets within 4 to 8 years, a common live expectancy. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the estimated useful lives and residual values of fixed assets and therefore future depreciation and amortization charges could be revised. The net carrying amount of fixed assets in the statement of financial position date is disclosed in Note 5 to the consolidated financial statements.

Capitalisation of exploration and evaluation costs

The Group's accounting policy for exploration and evaluation expense results in certain items of expense being capitalized for an area of interest where they are considered likely to be recoverable through future exploitation or sale or where the activities have not reached a stage that permits a reasonable assessment of the existence of reserves. This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established.

Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalized the expenditure under the policy a judgment is made that the recovery of the expense is unlikely, the relevant capitalized amount will be written off to profit or loss.

Development activities commence after a project sanctioned by the appropriate level of management. Judgment is applied by management in determining whether a project is economically viable. In exercising this judgment, management is required to make certain estimates and assumptions similar to those described above for the capitalization exploration and valuation expense.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2025
Kas - Rupiah	30.995.422
Bank - Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.730.876.257
PT Bank Permata Tbk	1.984.387.247
PT Bank Capital Indonesia Tbk	608.293.290
PT Bank Cimb Niaga Tbk	89.609.561
PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah	16.121.194
PT Bank Sinarmas Tbk	14.146.914
PT Bank Central Asia Tbk	978.279
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.500
Sub jumlah	5.444.415.242
Bank - Dollar Amerika Serikat	
PT Bank Permata Tbk	26.807.231
PT. Bank Sinarmas Tbk	6.227.465
Sub jumlah	33.034.696
Jumlah	5.508.445.360

5. PIUTANG USAHA

	2025
Pihak berelasi (Catatan 29)	20.706.246.101
Pihak ketiga	15.486.838.232
Sub jumlah	36.193.084.333
Penyisihan atas penurunan nilai	(20.706.246.101)
Neto	15.486.838.232

Rincian saldo piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2025
Rupiah	
PT Gunung Bara Utama	20.706.246.101
PT Manggala Usaha Manunggal	9.127.752.182
PT Global Energi Tama	6.359.086.050
PT Berau Coal Energy	-
CREI-CTCE Consortium	-
Sub jumlah	36.193.084.333
Penyisihan atas penurunan nilai	(20.706.246.101)
Neto	15.486.838.232

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024
Cash - Rupiah	12.209.012
Bank - Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.879.837.862
PT Bank Permata Tbk	4.605.676.792
PT Bank Capital Indonesia Tbk	608.368.290
PT Bank Cimb Niaga Tbk	130.851.831
PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Usaha Syariah	16.211.194
PT Bank Sinarmas Tbk	15.104.185
PT Bank Central Asia Tbk	356.211
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	72.500
Sub total	13.256.478.865
Bank - US Dollar	
PT Bank Permata Tbk	28.419.992
PT. Bank Sinarmas Tbk	7.403.489
Sub total	35.823.481
Total	13.304.511.358

5. TRADE RECEIVABLES

	2024
Related parties (Note 29)	20.706.246.101
Third parties	4.988.615.596
Sub total	25.694.861.697
Allowance for impairment	(20.706.246.101)
Net	4.988.615.596

Details of trade receivables are as follows:

	2024
Rupiah	
PT Gunung Bara Utama	20.706.246.101
PT Manggala Usaha Manunggal	4.373.668.577
PT Global Energi Tama	-
PT Berau Coal Energy	321.957.019
CREI-CTCE Consortium	292.990.000
Sub total	25.694.861.697
Allowance for impairment	(20.706.246.101)
Net	4.988.615.596

Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

Details of the aging of trade receivables is as follow:

	2025	2024	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan	3.800.000.000	4.439.830.985	Neither past due nor impaired
1 - 30 hari	912.964.288	253.460.700	1 - 30 days
31 - 90 hari	9.215.121.994	311.210.000	31 - 90 days
>90 hari	22.264.998.051	20.690.360.012	>90 days
Sub jumlah	36.193.084.333	25.694.861.697	Sub total
Penyisihan atas penurunan nilai	(20.706.246.101)	(20.706.246.101)	Allowance for impairment
Neto	15.486.838.232	4.988.615.596	Net

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha ditentukan berdasarkan penilaian individual. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari piutang usaha.

Allowance for impairment losses of trade receivables is determined based on individual assessment. Management believes that the allowance for impairment of trade receivable is adequate to cover possible losses from trade receivable.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHER RECEIVABLES

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 29)	607.598.868	607.598.868	Related parties (Note 29)
Pihak ketiga	10.526.260.561	10.994.700.145	Third parties
Sub jumlah	11.133.859.429	11.602.299.013	Sub total
Penyisihan atas penurunan nilai	(10.267.098.868)	(10.267.098.868)	Allowance for impairment
Neto	866.760.561	1.335.200.145	Net

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	2025	2024	
Suku cadang	6.276.633.178	7.331.649.822	Spareparts
Minyak dan pelumas	161.504.382	146.776.279	Oli & lubricant
Perlengkapan kantor	63.888.700	56.915.809	Office supplies
Sub jumlah	6.502.026.260	7.535.341.910	Sub total
Penyisihan atas penurunan nilai	-	(590.770.310)	Allowance for impairment
Neto	6.502.026.260	6.944.571.600	Net

8. UANG MUKA

8. ADVANCES

	2025	2024	
Pemasok	667.338.781	897.582.896	Supplier
Internal	41.835.622	329.653.850	Internal
Pegawai	19.855.000	34.550.838	Employee
Jumlah	729.029.403	1.261.787.584	Total

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2025
Asuransi	8.959.151
Sewa	-
Lainnya	1.700.000
Jumlah	10.659.151

9. PREPAID EXPENSES

	2024	
	117.014.680	Insurance
	116.408.011	Rent
	10.758	Others
	233.433.449	Total

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
PT Gunung Berkas Utama	-
	-

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	2025
Harga perolehan	22.765.000.000
Bagian akumulasi laba (rugi) pada entitas asosiasi	(22.765.000.000)
Neto	-

PT Gunung Berkas Utama - 40%

Berdasarkan Akta No. 229 tanggal 14 April 2015, AKAR memiliki investasi pada entitas asosiasi mewakili 40% kepemilikan di PT Gunung Berkas Utama dengan biaya perolehan sebesar Rp 600.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi adalah nihil, karena bagian AKAR atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi. AKAR tidak mengakui bagian atas rugi entitas asosiasi lebih lanjut, karena AKAR tidak memiliki kewajiban konstruktif atas entitas asosiasi.

Berdasarkan Akta No. 121 tanggal 30 November 2018, AKAR meningkatkan investasi pada entitas asosiasi mewakili 40% kepemilikan di PT Gunung Berkas Utama dengan biaya perolehan sebesar Rp 22.765.000.000 yang semula Rp 600.000.000 yang berasal dari konversi piutang PT Gunung Berkas Utama sebesar Rp 22.165.000.000.

Pencabutan IUP PT Gunung Berkas Utama (GBU)

Pada tanggal 15 Februari 2022, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") telah menerbitkan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") PT Gunung Berkas Utama.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES

The carrying value of investments in an associate using equity method as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2024	
	-	PT Gunung Berkas Utama
	-	

Movements investment in associates are as follows:

	2024	
	22.765.000.000	Cost of acquisition
	(22.765.000.000)	Portion of accumulated profit (loss) of investment in associates
	-	Net

PT Gunung Berkas Utama - 40%

Based on Notarial Deed No. 229 dated April 14, 2015, AKAR has an investment in associates representing a 40% interest in PT Gunung Berkas Utama at a cost of Rp 600,000,000. As of December 31, 2017, the carrying value of investments in associates is nil, because AKAR's share of losses of associates exceeds their interests in associates. AKAR does not recognize part of the loss of the associated entity further, because AKAR does not have a constructive obligation to the associate.

Based on Deed No. 121 dated November 30, 2018, AKAR increased investment in associates representing 40% ownership in PT Gunung Berkas Utama with acquisition cost of Rp 22,765,000,000 which was previously Rp 600,000,000 originating from the conversion of other receivable PT Gunung Berkas Utama amounting to Rp 22,165,000,000.

Revocation IUP of PT Gunung Berkas Utama (GBU)

As of February 15, 2022, the Minister of Investment/ Indonesia Investment Coordinating Board has issued a letter of revocation of the PT Gunung Berkas Utama's mining business permit.

Berdasarkan surat pencabutan izin PT Gunung Berkat Utama, Pada tanggal 21 Februari 2022, mengirimkan surat keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gunung Berkat Utama (GBU) dan permohonan pembatalan pencabutan IUP dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kronologis Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki PT GBU, sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/52/HK/II/2008 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum kepada PT GBU seluas 7.652 HA yang terletak di kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Februari 2008;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 540-i/K.392/HK/IV/2010 tentang persetujuan penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT GBU tanggal 28 April 2020;
 - c. eputusan Bupati Kutai Timur No. 540.1/K.849/HK/IX/2013 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT GBU tanggal 23 September 2013.
2. IUP Operasi Produksi yang PT GBU miliki No. 540.1/K.849/HK/IX/2013 telah mendapatkan Sertifikat Clear and Clean yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan No, 710/Bb/03/2016 tertanggal 21 April 2016.
3. Sejak PT GBU memperoleh IUP Eksplorasi, PT GBU telah melakukan pembayaran iuran tetap kepada negara dengan nilai sebesar ±Rp 4,1Milyar.
4. Selain pembayaran IUP tetap, PT GBU juga telah mengeluarkan biaya eksplorasi (pemboran dan konsultan) dengan nilai sebesar ± Rp 31,8 Milyar.
5. PT GBU telah melaksanakan kegiatan eksplorasi dengan menunjuk konsultan asing (Australia) yaitu PT CSA Global Indonesia untuk menentukan cadangan Batubara di lokasi tambang PT GBU dann PT CSA Global Indonesia telah mengeluarkan laporannya No. R155.2013 tertanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Competent Person.
6. Dalam rentang waktu 2013-2020, PT GBU belum dapat melakukan aktivitas produksi/operasionalnya mengingat jarak hauling dari lokasi tambang kami sampai ke sungai terdekat sejauh ±100 Km sehingga dengan harga batubara yang relatif rendah untuk harga batubara Newcastle (GAR >6000 Kcal/Kg) di tahun 2009-2020 pertengahan berkisar di US\$30/ ton – US\$100/ton sehingga dengan GAR 4.500 Kcal/kg dinilai tidak ekonomis pada saat itu dan PT GBU memerlukan waktu untuk mempersiapkan pembangunan infrastruktur pertambangan, oleh karena itu PT GBU berencana untuk segera melakukan produksi penambangan batubara.

Based on PT Gunung Berkat Utama's license revocation letter, On February 21, 2022, sent an objection letter to the revocation of the PT Gunung Berkat Utama (GBU) Mining Business Permit (GBU) and a request for cancellation of the IUP revocation by submitting the following matters:

1. The chronology of Mining Business Permits owned by PT GBU are as follows:
 - a. Decree of the Regent of East Kutai No. 188.4.45/52/HK/II/2008 concerning Mining Business Permit (IUP) for general investigation to PT GBU covering an area of 7,652 HA located in Bengalon sub-district, East Kutai district on February 11, 2008;
 - b. Decree of the Regent of East Kutai No. 540-i/K.392/HK/IV/2010 concerning approval of the adjustment of the Exploration Mining Business Permit (IUP) to PT GBU dated April 28, 2020;
 - c. Decree of the Regent of East Kutai No. 540.1/K.849/HK/IX/2013 concerning the approval to increase the Exploration Mining Business Permit (IUP) to Production Operation Mining Business Permit (IUP) to PT GBU on September 23, 2013.
2. Production Operation IUP that PT GBU has No. 540.1/K.849/HK/IX/2013 has obtained a Clear and Clean Certificate issued by the Director General of Mineral and Coal No, 710/Bb/03/2016 dated April 21, 2016.
3. Since PT GBU obtained an Exploration IUP, PT GBU has paid a fixed fee to the state with a value of ±Rp 4.1 billion.
4. In addition to the payment of a fixed IUP, PT GBU has also incurred exploration costs (drilling and consultants) with a value of ± Rp. 31.8 billion.
5. PT GBU has carried out exploration activities by appointing a foreign consultant (Australia) namely PT CSA Global Indonesia to determine Coal reserves at the PT GBU mine site and PT CSA Global Indonesia has issued its report No. R155.2013 dated 27 February 2013 signed by the Competent Person.
6. In the 2013-2020 period, PT GBU has not been able to carry out its production/operational activities considering the hauling distance from our mine site to the nearest river is ±100 Km so that coal prices are relatively low for Newcastle coal prices (GAR >6000 Kcal/ Kg) in the mid 2009-2020 ranged at US\$30/ton – US\$100/ton so with GAR 4,500 Kcal/kg it was considered uneconomical at that time and PT GBU needed time to prepare mining infrastructure development, therefore PT GBU plans to immediately carry out coal mining production.

7. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 PT GBU telah menyampaikan RKAB kepada ESDM dan pada tahun 2017 PT GBU juga menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan Dan Anggaran Belanja (RKTTLAB).
8. PT GBU telah melakukan proses pengajuan RKAB untuk tahun 2021 melalui website dengan surat permohonan No. 002/GBK-DIR/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan telah mendapatkan surat penolakan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. T 820.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 1 Februari 2022.

PT GBU menyatakan keberatan atas siaran pers pencabutan IUP tersebut dimana PT GBU terdaftar dalam daftar pencabutan IUP dengan nomor urut 66. Dasar keberatan atas siaran pers pencabutan IUP tersebut adalah karena:

- PT GBU tidak pernah menerima surat peringatan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral sebelum adanya siaran pers pencabutan IUP tersebut;
- PT GBU telah memenuhi sebagian besar kewajiban keuangan, namun oleh karena akun GBU di system MODI saat ini telah dihapus, maka PT GBU tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban selanjutnya;
- PT GBU saat ini sedang melaksanakan kegiatan pemasangan tata batas untuk pemenuhan kekurangan sebagaimana diminta dalam Surat Penolakan RKAB.

Pada tanggal 23 Maret 2022, manajemen GBU telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Lawyer Neil Sadek and Partners dalam pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 April 2022, GBU telah menerima surat undangan rapat penyelesaian klaim GBU dengan agenda rapat klarifikasi dan verifikasi dokumen perizinan dan non perizinan IUP yang telah dicabut.

Pada tanggal 11 Mei 2022, Lawyer Neil Sadek and Partners selaku kuasa hukum GBU telah mengirimkan dokumen gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan permohonan keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) GBU dan permohonan pembatalan pencabutan IUP kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

7. In 2013 to 2018 PT GBU has submitted the RKAB to ESDM and in 2017 PT GBU also submitted the Annual Technical and Environmental Work Plan and Expenditure Budget (RKTTLAB).
8. PT GBU has carried out the process of submitting the RKAB for 2021 through the website with application letter No. 002/GBK- DIR/XII/2021 dated 27 December 2021 and has received a rejection letter from the Directorate General of Mineral and Coal No. T 820.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 dated 2022, February 1st.

PT GBU stated its objection to the press release regarding the revocation of the IUP, where PT GBU was listed on the list of IUP revocations with serial number 66. The basis for the objection to the press release regarding the revocation of the IUP was because:

- PT GBU has never received an official warning letter issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources prior to the press release of the revocation of the IUP;
- PT GBU has fulfilled most of its financial obligations, but because the GBU account in the MODI system has now been deleted, PT GBU is unable to pay any further obligations;
- PT GBU is currently carrying out boundary demarcation activities to fulfill the shortfall as requested in the RKAB Rejection Letter.

On March 23, 2022, the GBU's Management has appointed and authorized Lawyer Neil Sadek and Partners in filing a state administrative lawsuit against the Head of Investment Coordinating Board on behalf of the Minister of the Energy and Mineral Resources and the Minister of Investment of the Republik of Indonesia.

On April 3, 2022, GBU has received an invitation letter for the GBU claim settlement meeting with the agenda of a meeting for clarification and verification of licensing and non-licensing documents. IUP permit that has been revoked.

On May 11, 2022, Lawyer Neil Sadek and Partners as GBU's attorney has sent a state administrative lawsuit document to the State Administrative Court related to an objection request to the revocation of the GBU's Mining Business Permit (IUP) and a request to cancel the IUP revocation to the Minister of Energy and Mineral Resources and the Minister of Investment of the Republik of Indonesia, the Investment Coordinating Board (BKPM).

Pada tanggal 31 Januari 2023, gugatan PT Gunung Berkat Utama (GBU) kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI perihal pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gunung Berkat Utama dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga dengan putusan tersebut mewajibkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI untuk mencabut surat pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gunung Berkat Utama.

On January 31, 2023, the lawsuit of PT Gunung Berkat Utama (GBU) to the Minister of Investment/Head of BKPM RI a.n Minister of Energy and Mineral Resources RI regarding the revocation of the Mining Business License (IUP) of PT Gunung Berkat Utama was granted by the State Administrative Court (PTUN) so that the decision obliged the Minister of Investment/Head of BKPM RI a.n Minister of Energy and Mineral Resources RI to revoke the letter of revocation of the Mining Business License (IUP) of PT Gunung Berkat Utama.

Kemudian melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding e-Court pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) pada tanggal 15 Februari 2023 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 225/G/2022/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2023. Pada tanggal 22 Februari 2023, pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) (tergugat/pembanding) telah mengunggah/mengupload memori Banding Nomor: 225/G/2022/PTUN-JKT melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang telah diverifikasi pada tanggal 23 Februari 2023.

Then through the e-Court Notice of Appeal, the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM) on February 15, 2023 has declared an Appeal against the Decision of the Jakarta State Administrative Court Number: 225/G/2022/PTUN-JKT dated January 31, 2023. On February 22, 2023, the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM) (defendant/appellant) uploaded the Appeal Memory Number: 225/G/2022/PTUN-JKT through the Case Information System (e-Court), which was verified on February 23, 2023.

Pada tanggal 25 September 2023 dimana selaku pemohon kasasi/semula terbanding/semula Penggugat PT Gunung Berkat Utama dengan ini mengajukan Memori Kasasi yang berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 151/B/2023/PT.TUN.JKT tertanggal 23 Agustus 2023, dalam mengupayakan surat izin usaha pertambangan. pada tanggal 6 Mei 2024, Permohonan kasasi Penggugat ditolak berdasarkan putusan No.121 K/TUN/2024.

On September 25, 2023 where as the cassation applicant/formerly appellant/formerly Plaintiff PT Gunung Berkat Utama hereby submits a Cassation Memory objecting to the Decision of the Jakarta High Administrative Court No. 151/B/2023/PT.TUN.JKT dated August 23, 2023, in seeking a mining business license. on May 6, 2024, the Plaintiff's cassation request was rejected based on decision No.121 K/TUN/2024.

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

2025						
Deskripsi	Saldo awal/ Beg. balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	Description
Harga perolehan						Cost of acquisition
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	34.338.695.779	55.000.000	-	-	34.393.708.842	Building
Kendaraan dan alat berat	1.309.435.474.981	-	(160.757.572.474)	26.361.470.295	1.175.039.350.327	Vehicles and heavy equipment
Peralatan dan inventaris kantor	609.122.007.692	23.860.000	(38.131.019.956)	297.142.500	571.311.587.507	Office equipment and fixtures
Aset dalam penyelesaian	297.142.500	-		(297.142.500)	-	Assets in progress
Sub jumlah	1.953.193.320.952	78.860.000	(198.888.592.430)	26.361.470.295	1.780.744.646.676	Sub total
<u>Aset hak guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	1.450.536.467	606.697.703	-	-	2.057.234.170	Building
Kendaraan dan alat berat	26.361.470.295	-	-	(26.361.470.295)	-	Vehicles and heavy equipment
Sub jumlah	27.812.006.762	606.697.703	-	(26.361.470.295)	2.057.234.170	Sub total
Total harga perolehan	1.981.005.327.714	685.557.703	(198.888.592.430)	-	1.782.801.880.846	Total cost of acquisition

2025						
Deskripsi	Saldo awal/ Beg. balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	Description
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	31.854.905.572	635.439.566	-	-	32.490.389.095	Building
Kendaraan dan alat berat	1.203.982.517.019	48.798.781.768	(164.386.602.301)	11.256.097.977	1.099.650.798.752	Vehicles and heavy equipment
Peralatan dan inventaris kantor	576.667.892.911	15.848.708.732	(34.501.990.129)	-	558.014.611.513	Office equipment and fixtures
Sub jumlah	1.812.505.315.502	65.282.930.066	(198.888.592.430)	11.256.097.977	1.690.155.799.361	Sub total
<u>Aset hak guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	1.254.575.229	704.678.322	-	-	1.959.253.551	Building
Kendaraan dan alat berat	8.529.121.498	2.726.976.479	-	(11.256.097.977)	-	Vehicles and heavy equipment
Sub jumlah	9.783.696.727	3.431.654.801	-	(11.256.097.977)	1.959.253.551	Sub total
Total akumulasi penyusutan	1.822.289.012.229	68.714.584.867	(198.888.592.430)	-	1.692.115.052.912	Total accumulated depreciation
Nilai buku	158.716.315.485				90.686.827.934	Book value
2024						
Deskripsi	Saldo awal/ Beg. balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	Description
Harga perolehan						Cost of acquisition
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	45.707.884.429	-	(11.369.188.650)	-	34.338.695.779	Building
Kendaraan dan alat berat	1.529.720.153.694	-	(260.677.459.298)	40.392.780.585	1.309.435.474.981	Vehicles and heavy equipment
Peralatan dan inventaris kantor	771.118.384.957	232.700.000	(168.352.275.503)	6.123.198.238	609.122.007.692	Office equipment and fixtures
Aset dalam penyelesaian	297.142.500	-	-	-	297.142.500	Assets in progress
Sub jumlah	2.346.843.565.580	232.700.000	(440.398.923.451)	46.515.978.823	1.953.193.320.952	Sub total
<u>Aset hak guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	933.209.734	517.326.733	-	-	1.450.536.467	Building
Peralatan dan inventaris kantor	2.184.160.509	-	-	(2.184.160.509)	-	Office equipment and fixtures
Kendaraan dan alat berat	70.693.288.609	-	-	(44.331.818.314)	26.361.470.295	Vehicles and heavy equipment
Sub jumlah	73.810.658.852	517.326.733	-	(46.515.978.823)	27.812.006.762	Sub total
Total harga perolehan	2.420.654.224.432	750.026.733	(440.398.923.451)	-	1.981.005.327.714	Total cost of acquisition
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	35.554.293.944	1.614.726.979	(5.314.115.351)	-	31.854.905.572	Building
Kendaraan dan alat berat	1.403.199.889.620	39.518.324.643	(260.655.111.768)	21.919.414.524	1.203.982.517.019	Vehicles and heavy equipment
Peralatan dan inventaris kantor	712.152.991.465	23.571.443.319	(160.587.340.112)	1.530.798.239	576.667.892.911	Office equipment and fixtures
Sub jumlah	2.150.907.175.029	64.704.494.941	(426.556.567.231)	23.450.212.763	1.812.505.315.502	Sub total
<u>Aset hak guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	738.791.038	515.784.191	-	-	1.254.575.229	Building
Peralatan dan inventaris kantor	1.403.231.572	127.566.667	-	(1.530.798.239)	-	Office equipment and fixtures
Kendaraan dan alat berat	16.098.418.872	6.019.931.837	8.330.185.313	(21.919.414.524)	8.529.121.498	Vehicles and heavy equipment
Sub jumlah	18.240.441.482	6.663.282.695	8.330.185.313	(23.450.212.763)	9.783.696.727	Sub total
Total akumulasi penyusutan	2.169.147.616.511	71.367.777.636	(418.226.381.918)	-	1.822.289.012.229	Total accumulated depreciation
Nilai buku	251.506.607.921				158.716.315.485	Book value

Penyusutan dialokasikan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Depreciation allocated to the consolidated statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2025	2024	
Beban pokok pendapatan (Catatan 26)	67.989.823.167	70.728.730.845	Costs of revenues (Note 26)
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	724.761.701	639.046.791	General and administrative expense (Note 27)
Neto	68.714.584.867	71.367.777.636	Net

Perhitungan keuntungan (kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The calculation of gain (loss) on sale and disposal of fixed assets for the years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2025			
	Penjualan/ Sale	Penghapusan/ Disposal	Jumlah/ Total	
Hasil penjualan	4.336.936.937	-	4.336.936.937	Proceeds from sale
Biaya perolehan	66.089.437.340	132.799.155.090	198.888.592.430	Acquisition costs
Akumulasi penyusutan	(66.089.437.340)	(132.799.155.090)	(198.888.592.430)	Accumulated depreciation
Nilai buku	-	-	-	Book value
Keuntungan (kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap	4.336.936.937	-	4.336.936.937	Gain (loss) on sale and disposal of fixed assets
	2024			
	Penjualan/ Sale	Penghapusan/ Disposal	Jumlah/ Total	
Hasil penjualan	39.952.496.669	-	39.952.496.669	Proceeds from sale
Biaya perolehan	433.292.388.809	7.106.534.645	440.398.923.454	Acquisition costs
Akumulasi penyusutan	(412.619.260.292)	(5.607.121.626)	(418.226.381.918)	Accumulated depreciation
Nilai buku	20.673.128.517	1.499.413.019	22.172.541.536	Book value
Keuntungan (kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap	19.279.368.152	(1.499.413.019)	17.779.955.133	Gain (loss) on sale and disposal of fixed assets

Penyitaan Aset Perusahaan Entitas Anak (RBA)

Pada tanggal 18 Mei 2022 - 19 Mei 2022 dan 19 Agustus 2022, aset Perusahaan disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berdasarkan surat No.031/RBA-DIR/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022, dan surat No.042/RBA-DIR/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, Perusahaan telah mengajukan surat keberatan terhadap penyitaan aset Perusahaan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merupakan pihak ketiga selaku kontraktor untuk PT Gunung Bara Utama dan bukan sebagai terpidana berdasarkan putusan 2391/2021.

Consifcation of Company Assets of Subsidiary (RBA)

On May 18-19, 2022 and August 19, 2022, the Company's assets were seized by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Based on Letter No.031/RBA-DIR/VI/2022 dated June 17, 2022, and Letter No.042/RBA-DIR/VIII/2022 dated August 29, 2022, the Company submitted objection letters regarding the seizure of its assets to the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, stating that the Company is a third party acting as a contractor for PT Gunung Bara Utama and not a convicted party under Decision No. 2391/2021.

Penyitaan aset Perusahaan dilaksanakan atas dasar hukuman uang pengganti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2931 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:4/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tertanggal 24 Februari 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST tertanggal 26 Oktober 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Putusan No.2391/2021"). Padahal Penggugat hanyalah pihak ketiga selaku kontraktor untuk PT Gunung Bara Utama dan bukan sebagai terpidana berdasarkan Putusan 2391/2021.

The seizure of the Company's assets was carried out based on substitute money penalty sanctions pursuant to Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 2931 K/PID.SUS/2021 dated August 24, 2021 in conjunction with Jakarta High Court Decision No. 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI dated February 24, 2021 in conjunction with Central Jakarta District Court Decision No. 30/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST dated October 26, 2020 (hereinafter referred to as "Decision No. 2391/2021"). Whereas the Plaintiff is merely a third party acting as a contractor for PT Gunung Bara Utama and not a convicted party under Decision No. 2391/2021.

Atas sita eksekusi yang terjadi, Perusahaan telah melakukan gugatan pada tanggal 22 September 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No.331/G/TF/2022/PTUN-JKT, mengenai penyitaan aset tetap berupa 5 unit Excavator, 5 unit Bulldozer, 1 unit Motor Grader, 6 unit Heavy Truk, 3 unit Articulate Truck, 2 unit Dump Truk, 1 unit Water Truk, 1 unit Fuel Truk, 1 unit Water Pump, serta 5 unit Tower Lamp.

In relation to the execution seizure, the Company filed a lawsuit on September 22, 2022, which was registered at the Administrative Court Clerk's Office under No. 331/G/TF/2022/PTUN-JKT, concerning the seizure of fixed assets consisting of 5 Excavators, 5 Bulldozers, 1 Motor Grader, 6 Heavy Trucks, 3 Articulated Trucks, 2 Dump Trucks, 1 Water Truck, 1 Fuel Truck, 1 Water Pump, and 5 Tower Lamps.

Berdasarkan Putusan No.163/B/TF/2023/PT.TUN.JKT tanggal 23 Agustus 2023 dinyatakan bahwa usaha banding Perusahaan atas kasus tersebut ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.331/G/TF/2022/PTUN-JKT tertanggal 6 Maret 2023.

Based on Decision No. 163/B/TF/2023/PT.TUN.JKT dated August 23, 2023, the Company's appeal was rejected and upheld the Jakarta Administrative Court Decision No. 331/G/TF/2022/PTUN-JKT dated March 6, 2023.

Atas penolakan putusan banding tersebut, Perusahaan mengajukan Kasasi melalui Memori Kasasi pada tanggal 15 September 2023.

Following the rejection of the appeal, the Company filed a Cassation through a Memorandum of Cassation on September 15, 2023.

Pada tanggal 20 Desember 2024 PT Ricobana Abadi sebagai penggugat mengajukan permohonan Peninjauan kembali ("PK") atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.123 K/TUN/TF/2024/PT.TUN.JKT tanggal 4 Juli 2024.

On December 20, 2024, PT Ricobana Abadi as the plaintiff filed a Judicial Review ("PK") petition against the State Administrative High Court Decision No. 123 K/TUN/TF/2024/PT.TUN.JKT dated July 4, 2024.

12. ASET TAK BERWUJUD

12. INTANGIBLE ASSETS

	2025 dan 2024 / 2025 and 2024				
	Goodwill	Piranti lunak komputer/ Computer software	Hubungan terkait pelanggan/ Customer relationships	Jumlah/ Total	
Harga perolehan	274.794.895.624	7.115.095.693	297.396.465.343	579.306.456.660	Cost of acquisition
Akumulasi amortisasi	-	(7.115.095.693)	(297.396.465.343)	(304.511.561.036)	Accumulated amortization
Penurunan nilai	(59.368.488.266)	-	-	(59.368.488.266)	Impairment
Nilai buku	215.426.407.358	-	-	215.426.407.358	Book Value

Pada bulan Agustus 2014, Perusahaan telah mengakuisisi 99,99% saham PT Adibrata Cipta Pertiwi (ACP) - dahulu bernama PT Ricobana (RB) dengan nilai pembelian total sebesar \$AS87.801.639 (atau setara dengan Rp1.017.708.800.000). Atas transaksi ini Perusahaan mengakui goodwill sebesar \$AS 20.283.060 (atau setara dengan Rp274.794.895.624).

In August 2014, the Company acquired 99.99% equity interest in PT Ricobana ("RB") with purchase consideration amounting to US\$87,801,639 (or equivalent to Rp1,017,708,800,000). For this transaction, the Company recognized a goodwill amounting to US\$20,283,060 (or equivalent to Rp274,794,895,624).

Penurunan nilai goodwill diuji setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) jika terdapat keadaan yang menunjukkan nilai tercatat mengalami penurunan nilai. Perusahaan menguji penurunan nilai untuk goodwill berdasarkan pada perhitungan nilai pakai yang menggunakan model arus kas diskonto.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai aset takberwujud cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian.

Goodwill is tested for impairment annually (as of December 31) if circumstances indicate the carrying value may be impaired. The Company's impairment test for goodwill is based on value in use calculation that uses a discounted cash flow model.

As of December 31, 2025 and 2024, management believes that the impairment of intangible assets is sufficient to cover possible losses.

13. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

	2025
Kapitalisasi riset pengembangan	272.756.441.315
Jumlah	272.756.441.315

Akun ini merupakan aset eksplorasi dan evaluasi PT Delta Samudra, entitas anak tidak langsung yang terletak di Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan saat ini WIUP PT Delta Samudra masih dalam proses permohonan IPPKH.

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pencabutan IUP PT Delta Samudra

Pada tanggal 15 Februari 2022, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") telah menerbitkan surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") PT Delta Samudra.

Berdasarkan surat pencabutan izin PT Delta Samudra mengirimkan surat keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan permohonan pembatalan pencabutan IUP dengan menyampaikan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rentang waktu 2010-2013, PT Delta Samudra telah melaksanakan kegiatan eksplorasi dengan melakukan pemboran sebanyak ±214 titik bor dengan biaya berkisar ±Rp42.000.000.000. Adapun dari hasil kegiatan eksplorasi tersebut, disimpulkan bahwa PT Delta Samudra memiliki kualitas batubara dengan peringkat rendah (low-rank coal) dengan rata-rata kalori 3110 Kcal/Kg (GAR) dengan estimasi cadangan 43 juta ton batubara.
- Dalam rentang waktu 2012-2019, PT Delta Samudra belum dapat melakukan aktivitas produksi/operasionalnya mengingat harga batubara yang relatif rendah. Untuk harga batubara Newcastle (GAR>6000 Kcal/Kg) pada tahun 2009-2019, berkisar di USD\$48/ton - US\$130/ton. Sehingga, dengan GAR 3110 Kcal/Kg, dinilai tidak ekonomis.

13. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

	2024	
	272.756.441.315	Capitalisation of development research
Jumlah	272.756.441.315	Total

This account represents exploration and evaluation assets of PT Delta Samudra, an indirect subsidiary located in Lingau, Nyuatan Sub-district, West Kutai Regency, East Kalimantan.

Up to the date of completion of the financial statements, WIUP of PT Delta Samudra is still in the process of applying for IPPKH.

The Group's management believes that there are no events or changes in circumstances that indicate impairment of exploration and evaluation assets as of December 31, 2025, and 2024.

Revocation of PT Delta Samudra's IUP

On 15 February 2022, the Ministry of Investment/Investment Coordinating Board ("BKPM") issued a letter revoking PT Delta Samudra's Mining Business Permit ("IUP").

Based on the revocation letter, PT Delta Samudra sent a letter of objection to the revocation of the Mining Business Permit (IUP) and a request for cancellation of the revocation of the IUP by submitting the following matters:

- In the span of 2010–2013, PT Delta Samudra carried out exploration activities by drilling ± 214 drill points at a cost of around Rp42,000,000,000. As for the results of these exploration activities, it is concluded that PT Delta Samudra has low-rank coal quality with an average calorie of 3110 kcal/kg (GAR) and estimated reserves of 43 million metric tonnes of coal.
- In the span of 2012–2019, PT Delta Samudra has not been able to carry out its production and operational activities due to relatively low coal prices. For Newcastle coal price (GAR>6000 kcal/kg) in 2009–2019, it ranged from USD\$48/ton to US\$130/ton. Thus, with a GAR of 3110 kcal/kg, it is considered uneconomical.

Namun demikian, PT Delta Samudra tetap membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), AMDAL, Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan, serta mengurus PPKH (dahulu IPPKH) serta membayar iuran tetap dengan akumulasi sebesar Rp 2.800.000.000.

- c. Bahwa PT Delta Samudra telah mendapatkan persetujuan akhir atas revisi Studi Kelayakan dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Mei 2021 dan Kelayakan serta Izin Lingkungan pada tanggal 7 Desember 2020.
- d. Pada saat ini, PT Delta Samudra sedang dalam proses persetujuan RKAP tahun 2022 dengan surat permohonan No. 002/DS-DIR/I/2022 dengan status terakhir Proses Evaluasi III pada tanggal 11 Februari 2022.

Pada tanggal 23 Maret 2022, manajemen PT Delta Samudra telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Lawyer Neil Sadek and Partners dalam pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Investasi Republik Indonesia.

Pada tanggal 3 April 2022, PT Delta Samudra telah menerima surat undangan rapat penyelesaian klaim Perusahaan dengan agenda rapat klarifikasi dan verifikasi dokumen perizinan dan non-perizinan IUP yang telah dicabut.

Pada tanggal 11 Mei 2022, Lawyer Neil Sadek and Partners, selaku kuasa hukum PT Delta Samudra, telah mengirimkan dokumen gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan permohonan keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Delta Samudra serta permohonan pembatalan pencabutan IUP kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada tanggal 31 Januari 2023, gugatan PT Delta Samudra kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI perihal pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga dengan putusan tersebut mewajibkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI a.n Menteri ESDM RI untuk mencabut surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Delta Samudra.

Kemudian, melalui Surat Pemberitahuan Banding E-court, pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) pada tanggal 15 Februari 2023 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 224/G/2022/PTUN JKT tanggal 31 Januari 2023. Pada tanggal 22 Pebruari 2023, pihak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) (Tergugat/ Pembading) telah mengunggah/mengupload memori Banding No: 224/G/2022/PTUN-JKT melalui sistem informasi perkara (e-court), yang telah diverifikasi pada tanggal 23 Februari 2023.

However, PT Delta Samudra still made a Work Plan and Budget Cost (RKAB), AMDAL, Exploration Report, Feasibility Study, processed PPKH (formerly IPPKH), and paid a fixed fee with an accumulation of Rp 2,800,000,000.

- c. *PT Delta Samudra has received final approval of the revised feasibility study from the Energy and Mineral Resources Agency of East Kalimantan Province on May 25, 2021, and the feasibility and environmental permit on December 7, 2020.*
- d. *Currently, PT Delta Samudra is in the process of approving the 2022 RKAP with application letter No. 002/DS-DIR/I/2022, with the last status of Evaluation Process III on February 11, 2022.*

On March 23, 2022, PT Delta Samudra's management appointed and granted power of attorney to Lawyer Neil Sadek and Partners in filing a state administrative lawsuit against the Head of the Investment Coordinating Board on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources and the Minister of Investment of the Republic of Indonesia.

On April 3, 2022, PT Delta Samudra received an invitation letter for the company's claim settlement meeting with the agenda of the clarification and verification meeting of the revoked IUP licencing and non-permitting documents.

On May 11, 2022, Lawyer Neil Sadek and Partners, as PT Delta Samudra's legal counsel, sent a state administrative lawsuit document to the State Administrative Court related to a request to object to the revocation of PT Delta Samudra's mining business permit (IUP) and a request to cancel the revocation of the IUP to the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Minister of Investment of the Republic of Indonesia, and the Investment Coordinating Board (BKPM).

On 31 January 2023, PT Delta Samudra's lawsuit against the Minister of Investment/Head of BKPM RI a.n Minister of ESDM RI regarding the revocation of The Company's Mining Business Permit (IUP) was granted by the State Administrative Court (PTUN) so that the decision obliges the Minister of Investment/Head of BKPM RI a.n Minister of ESDM RI to revoke the letter of revocation of PT Delta Samudra's Mining Business Permit (IUP).

Then, through the E-court Appeal Notification Letter, the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM) on 15 February 2023 has declared an Appeal against the Decision of the Jakarta State Administrative Court No. 224/G/2022/PTUN JKT dated 31 January 2023. On 22 February 2023, the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM) (Defendant/Appellant) uploaded the Appeal No.224/G/2022/PTUN JKT dated 31 January 2023: 224/G/2022/PTUN-JKT through the case information system (e-Court), which was verified on 23 February 2023.

Berdasarkan Putusan No. 179/B/2023/PT TUN JKT tanggal 23 Agustus 2023 diputuskan bahwa menerima permohonan banding dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No 224/G/2022/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2023.

Atas putusan tersebut, PT Delta Samudra berencana untuk melakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sebagai upaya untuk memperoleh kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Delta Samudra yang telah dicabut.

Based on Decision No. 179/B/2023/PT TUN JKT dated 23 August 2023, it was decided to accept the appeal from the Minister of Investment Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia and annul the Decision of the Jakarta State Administrative Court No. 224/G/2022/PTUN-JKT dated 31 January 2023.

Based on the verdict, PT Delta Samudra plans to file a judicial review (PK) at the Supreme Court in an effort to regain the revoked PT Delta Samudra's Mining Business Licence (IUP).

14. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan jaminan reklamasi Grup pada Bendahara Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp400.000.000 untuk reklamasi area yang terletak di Kalimantan Timur.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai pada aset lain-lain.

14. OTHER ASSETS

This account represents the group's reclamation guarantee to the Post-Mining Guarantee Treasurer, amounting to Rp400,000,000 for the reclamation of an area located in East Kalimantan.

As of December 31, 2025, and 2024, management believes that there is no indication of impairment in other assets.

15. UTANG USAHA

	2025
PT Horizon Constraction Indonesia	14.800.943.943
PT Linda Hanta Wijaya	4.880.431.155
PT DNX Indonesia	4.141.407.888
PT United Tractor Tbk	3.967.781.250
PT Cahaya Nusantara Cipta	1.453.920.000
PT Blessindo Prima Sarana	968.768.004
PT Sarana Power Sedaya	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	14.239.361.853
Jumlah	44.452.614.093

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	2025
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan	52.865.633
1 - 30 hari	3.386.261.484
31 - 90 hari	6.135.743.269
>90 hari	34.877.743.707
Neto	44.452.614.093

15. ACCOUNT PAYABLES

	2024	
PT Horizon Constraction Indonesia	12.012.287.009	PT Horizon Constraction Indonesia
PT Linda Hanta Wijaya	5.051.526.555	PT Linda Hanta Wijaya
PT DNX Indonesia	4.561.294.863	PT DNX Indonesia
PT United Tractor Tbk	8.554.892.144	PT United Tractor Tbk
PT Cahaya Nusantara Cipta	-	PT Cahaya Nusantara Cipta
PT Blessindo Prima Sarana	1.829.852.102	PT Blessindo Prima Sarana
PT Sarana Power Sedaya	1.177.806.445	PT Sarana Power Sedaya
Others (each individual balance below Rp 1,000,000,000)	15.613.255.160	Others (each individual balance below Rp 1,000,000,000)
Total	48.800.914.278	Total

Details of the aging of trade payables is as follow:

	2024	
Neither past due nor impaired	7.058.945.825	Neither past due nor impaired
1 - 30 days	4.141.601.707	1 - 30 days
31 - 90 days	3.996.745.725	31 - 90 days
>90 days	33.603.621.021	>90 days
Net	48.800.914.278	Net

16. BIAYA AKRUAL

	2025
Bunga (Catatan 20)	22.475.015.035
Jasa tenaga ahli	168.000.000
Kesejahteraan karyawan	119.115.462
Lain-lain	115.698.481
Jumlah	22.877.828.978

16. ACCRUED EXPENSES

	2024	
(Notes 20) Interest	22.475.015.035	(Notes 20) Interest
Expert services	476.000.000	Expert services
Employee welfare	4.793.331.553	Employee welfare
Others	1.253.634.770	Others
Total	28.997.981.358	Total

17. UTANG LAIN-LAIN

17. OTHERS PAYABLES

	2025	2024	
Jangka pendek			Short-term
Pihak ketiga			Third parties
PT Kalibesar Raya Utama	1.074.280.478	1.074.280.478	PT Kalibesar Raya Utama
PT Manggala Usaha Manunggal	640.431.099	-	PT Manggala Usaha Manunggal
PT Lintasmaya Multimedia	32.700.000	-	PT Lintasmaya Multimedia
Toko Semoga Raya	27.558.000	-	Toko Semoga Raya
PT Weirs Minerals Indonesia	25.581.560	-	PT Weirs Minerals Indonesia
PT Limbah Bina Sejahtera	22.781.000	-	PT Limbah Bina Sejahtera
PT Regalia Energi Persada	21.388.212	-	PT Regalia Energi Persada
CV Jaya Consulting	16.250.000	-	CV Jaya Consulting
PT Restynur	11.680.000	199.367.900	PT Restynur
PT Surya Artha Nusantara	-	2.000.000.000	PT Surya Artha Nusantara
PT Partnerindo Inti Cipta	-	1.542.134.225	PT Partnerindo Inti Cipta
PT Transkon Jaya	-	8.880.000	PT Transkon Jaya
Lain-lain	1.818.537.803	6.225.036.305	Lain-lain
Jumlah	3.691.188.152	11.049.698.908	Total
Jangka panjang			Long-term
Pihak ketiga	704.986.920	704.986.920	Third parties
Pihak berelasi	-	491.263.618	Related parties
Jumlah	704.986.920	1.196.250.538	Total

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka dan estimasi klaim pengembalian pajak

a. Prepaid tax and estimated claims for refundable taxes

Pajak dibayar dimuka

Prepaid tax

	2025
PPN masukan	59.482.500
Jumlah	59.482.500

	2024
Value added tax - in	17.551.899.600
Total	17.551.899.600

Estimasi klaim pengembalian pajak

Estimated claims for refundable taxes

	2025
Lebih bayar pajak penghasilan	3.237.716.218
Jumlah	3.237.716.218

	2024
Overpayments of corporate income tax	9.658.330.947
Total	9.658.330.947

b. Utang pajak

b. Tax payable

	2025
PPN keluaran	933.095.731
Pajak penghasilan	
PPh pasal 4 (2)	196.605.758
Pasal 21	3.623.315.723
Pasal 23	8.364.106
Jumlah	4.761.381.318

	2024
Value added tax - out	2.447.082.079
Income tax	
Article 4 (2)	103.486.946
Article 21	388.698.955
Article 23	67.063.348
Total	3.006.331.328

c. Manfaat (beban) pajak penghasilan

	2025
Pajak kini	
Perusahaan	-
Entitas anak	-
Sub jumlah	-
Pajak tangguhan	
Perusahaan	-
Entitas anak	(61.012.797.727)
Sub jumlah	(61.012.797.727)
Jumlah	(61.012.797.727)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan rugi fiskal Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

c. Income tax benefit (expense)

	2024	
		Current tax
	-	The Company
	-	Subsidiaries
	-	Sub total
		Deferred tax
	-	The Company
	5.674.679.555	Subsidiaries
	5.674.679.555	Sub total
	5.674.679.555	Total

Current tax

The reconciliation between loss before income tax as presented in the consolidated statements of comprehensive income and the Company's taxable loss for the years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2025	2024	
Rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(81.997.383.399)	(97.832.667.316)	Loss before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak	(74.550.281.082)	(89.579.940.622)	Less loss before income tax of subsidiaries
Rugi sebelum pajak penghasilan perusahaan	(7.447.102.317)	(8.252.726.694)	Loss before income tax of the company
Beda temporer	-	-	Temporary differences
Beda tetap:			Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	-	61.631.300	Non-deductible expenses
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(51.874.771)	-	Income already subjected to final tax
Taksiran rugi fiskal tahun berjalan	(7.498.977.088)	(8.191.095.394)	Estimated fiscal loss for the year
Akumulasi rugi fiskal periode sebelumnya	(58.736.847.754)	(50.545.752.360)	Accumulated tax loss
Akumulasi rugi fiskal Saldo akhir	(66.235.824.842)	(58.736.847.754)	Accumulated fiscal losses - Ending balance
Pajak kini	-	-	Current tax

d. Pajak penghasilan tangguhan

d. Deferred income tax

	2025					
	1 Januari/ January 1	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustments	31 Desember/ December 31	
Aset (liabilitas)						Deferred tax
pajak						assets
tangguhan						(liabilities)
<u>Perusahaan</u>						<u>The Company</u>
Cadangan						Allowance for
penurunan						impairment
nilai	29.705.766.720	-	-	-	29.705.766.720	losses
<u>Entitas anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Liabilitas						Employment
imbalan						benefits
kerja	4.754.270.528	554.863.109	(713.987.696)	-	4.595.145.941	liabilities
Liabilitas						Lease
sewa	(60.725.361.860)	-	-	60.712.385.434	(12.976.426)	liabilities
Cadangan						Allowance for
penurunan						impairment
nilai	4.555.374.142	-	-	-	4.555.374.142	losses
Aset hak						Right-of-
guna	276.006.552	-	-	(254.450.816)	21.555.736	use assets
Total aset						Total
(liabilitas)						deferred tax
pajak						asset
tangguhan	(21.433.943.918)	554.863.109	(713.987.696)	60.457.934.618	38.864.866.113	(liabilities)
	2024					
	1 Januari/ January 1	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustments	31 Desember/ December 31	
Aset (liabilitas)						Deferred tax
pajak						assets
tangguhan						(liabilities)
<u>Perusahaan</u>						<u>The Company</u>
Cadangan						Allowance for
penurunan						impairment
nilai	29.705.766.720	-	-	-	29.705.766.720	losses
<u>Entitas anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Liabilitas						Employment
imbalan						benefits
kerja	5.472.679.377	(678.550.576)	(39.858.273)	-	4.754.270.528	liabilities
Liabilitas						Lease
sewa	(66.965.119.469)	1.417.486.414	-	4.822.271.195	(60.725.361.860)	liabilities
Cadangan						Allowance for
penurunan						impairment
nilai	4.555.374.142	-	-	-	4.555.374.142	losses
Aset hak						Right-of-
guna	162.534.030	113.472.522	-	-	276.006.552	use assets
Total aset						Total
(liabilitas)						deferred tax
pajak						asset
tangguhan	(27.068.765.200)	852.408.360	(39.858.273)	4.822.271.195	(21.433.943.918)	(liabilities)

Rincian akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi Grup untuk adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Perusahaan	(66.235.824.842)
Entitas Anak	
PT Adikarsa Alam Resources	(203.274.026)
PT Adibrata Cipta Pertiwi	(1.831.981.893)
PT Ricobana Abadi	(116.215.036.896)
PT Troposfir Pancar Sejati	(141.130.687)
PT Troposfir Mega Raya	(101.551.727)
PT Delta Samudra	(784.834.040)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, mengingat manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti yang memadai bahwa rugi fiskal yang belum digunakan dapat dimanfaatkan sebelum kedaluwarsanya.

Details of the tax losses that can be carried forward by the Group are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	The Company Subsidiaries
	(58.736.847.754)	
PT Adikarsa Alam Resources	(202.178.820)	PT Adikarsa Alam Resources
PT Adibrata Cipta Pertiwi	(780.362.479)	PT Adibrata Cipta Pertiwi
PT Ricobana Abadi	(211.076.752.272)	PT Ricobana Abadi
PT Troposfir Pancar Sejati	(100.074.072)	PT Troposfir Pancar Sejati
PT Troposfir Mega Raya	(101.451.727)	PT Troposfir Mega Raya
PT Delta Samudra	(782.662.832)	PT Delta Samudra

As at 31 December 2025 and 2024, the Group has not recognized any deferred tax assets arising from tax loss carryforwards, as management believes that there is insufficient evidence that the unused tax losses can be utilized before they expire.

19. MEDIUM TERM NOTES

Perusahaan menerbitkan Medium Term Notes ("MTN") sebesar Rp 400.000.000.000 dengan PT Garuda Nusantara Sekuritas selaku "Arranger".

Medium Term Notes (MTN) diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2017, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, telah jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022. Tingkat suku bunga sebesar 11,25% per tahun dan dibayarkan per 3 bulan.

Pada tanggal 05 Januari 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") melakukan pemantauan khusus dengan memberikan peringkat "idCCC/CreditWatch" atas MTN untuk periode dari tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") kembali melakukan pemantauan khusus dengan memberikan peringkat "idCCC/CreditWatch" atas MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 untuk periode dari tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.

Semua MTN diterbitkan di Indonesia dan dalam mata uang Rupiah. Seluruh utang MTN Perusahaan adalah tanpa jaminan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN, setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi utang Penerbit kepada Cheviot Investment Ltd.

19. MEDIUM TERM NOTES

RBA, a subsidiary, issued Medium Term Notes ("MTN") amounting to Rp 400,000,000,000, with PT Garuda Nusantara Sekuritas acting as the Arranger.

The Medium Term Notes (MTN) were issued on December 20, 2017, listed on the Indonesia Stock Exchange, and matured on December 20, 2022. The notes bear an interest rate of 11.25% per annum, payable quarterly.

On January 5, 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") conducted a special monitoring and assigned an "idCCC/CreditWatch" rating to the MTN for the period from January 4, 2023 to April 4, 2023.

Furthermore, on March 24, 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") again conducted a special monitoring and assigned an "idCCC/CreditWatch" rating to the Ricobana Abadi MTN I Year 2017 for the period from March 21, 2023 to June 21, 2023.

All MTNs were issued in Indonesia and are denominated in Rupiah. The Company's MTN liabilities are unsecured.

The proceeds from the issuance of the MTNs, after deducting issuance costs, were entirely used to repay the Issuer's debt to Cheviot Investment Ltd.

Berdasarkan perjanjian penerbitan MTN, RBA entitas anak diwajibkan untuk mematuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, mencakup pembatasan untuk tidak melakukan transaksi dengan nilai yang melebihi batas tertentu atau diluar syarat yang telah disetujui, antara lain penjualan dan pengalihan aktiva tetap, penggabungan usaha, akuisisi, perubahan bidang usaha utama Perusahaan, mengurangi modal Perusahaan, dan mengajukan pailit.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Perusahaan menerbitkan surat dengan No.061/RBA-DIR/XII/2022 perihal permohonan restrukturisasi kewajiban pembayaran bunga dan pokok MTN I Ricobana Abadi 2017 kepada PT MNC Asset Management yang berisi, permohonan atas kewajiban MTN I Ricobana Abadi 2017 yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp 400.000.000.000 dan bunga sebesar Rp 11.250.000.000, untuk dapat di restrukturisasi mengingat dalam 2 tahun terakhir Perusahaan masih mengalami kerugian dan belum dapat membukukan laba semenjak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Adapun permohonan restrukturisasi yang hendak di ajukan Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan jangka waktu pelunasan sampai dengan 20 Desember 2029 (7 tahun);
2. Pembayaran bunga yang jatuh tempo di 20 Desember 2022 sebesar Rp11.250.000.000 akan dibayarkan di 20 Desember 2022 sebesar Rp5.625.000.000 dan sisanya di 30 Maret 2023;
3. Penurunan tingkat suku bunga atas MTN I Ricobana Abadi 2017;
4. Pembayaran bunga restrukturisasi seluruhnya dilakukan di akhir yakni 20 Desember 2029; dan
5. Pelunasan pokok MTN I Ricobana Abadi 2017 dilakukan secara bertahap.

Pada tanggal 19 Desember 2022, Perusahaan menerima surat dari PT MNC Asset Management, dengan nomor surat No.204/MNCAM/DIR/XII/2022 perihal tanggapan permohonan restrukturisasi, yang berisi menindaklanjuti surat PT Ricobana Abadi No.061/RBA-DIR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, bahwasanya PT MNC Asset Management mempertimbangkan proposal restrukturisasi yang disampaikan dalam surat tersebut, dengan senantiasa tunduk kepada persetujuan/arahan dari pemegang unit penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan menerbitkan surat dengan nomor surat No.064/RBA-DIR/XII/2022 perihal surat tanggapan permohonan restrukturisasi, yang berisi mengajukan perpanjangan waktu sampai dengan 90 hari ("Masa Penangguhan") sejak tanggal 20 Desember 2022 untuk menyelesaikan proses restrukturisasi MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 dan oleh karenanya memohon agar RBA tidak dinyatakan telah lalai dalam membayar pokok MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 mengingat pernyataan lalai tersebut dapat mempengaruhi proses restrukturisasi.

Based on the MTN issuance agreement, RBA, a subsidiary, is required to comply with certain covenants related to the Company's business activities, including restrictions on entering into transactions exceeding certain limits or outside the agreed terms, among others the sale and transfer of fixed assets, mergers, acquisitions, changes in the Company's main line of business, reduction of the Company's capital, and filing for bankruptcy.

On December 16, 2022, the Company issued a letter No. 061/RBA-DIR/XII/2022 regarding a request for the restructuring of interest and principal payment obligations of MTN I Ricobana Abadi 2017 addressed to PT MNC Asset Management. The letter contained a request for the obligations of MTN I Ricobana Abadi 2017, which were due on December 20, 2022, amounting to Rp400,000,000,000 in principal and Rp11,250,000,000 in interest, to be restructured considering that over the past two years the Company has continued to incur losses and has not yet recorded profits since the COVID-19 pandemic in Indonesia.

The restructuring proposal submitted by the Company is as follows:

1. *Extension of the maturity date until December 20, 2029 (7 years);*
2. *The interest payment due on December 20, 2022 amounting to Rp11,250,000,000 will be paid Rp5,625,000,000 on December 20, 2022, and the remaining balance on March 30, 2023;*
3. *Reduction of the interest rate on MTN I Ricobana Abadi 2017;*
4. *Payment of the restructured interest in full at the end of the period, namely December 20, 2029; and*
5. *Settlement of the principal of MTN I Ricobana Abadi 2017 to be made in installments.*

On December 19, 2022, the Company received a letter from PT MNC Asset Management, with letter No. 204/MNCAM/DIR/XII/2022 regarding the response to the restructuring request. The letter stated that, in response to PT Ricobana Abadi's letter No. 061/RBA-DIR/XII/2022 dated December 16, 2022, PT MNC Asset Management would consider the restructuring proposal submitted in the letter, subject to the approval and/or direction of the unit holders and the Financial Services Authority (OJK).

On December 29, 2022, the Company issued a letter No. 064/RBA-DIR/XII/2022 regarding the response to the restructuring request, which contained a proposal for an extension of up to 90 days ("Suspension Period") from December 20, 2022 to complete the restructuring process of MTN I Ricobana Abadi 2017. Accordingly, the Company requested that RBA not be declared in default for the principal payment of MTN I Ricobana Abadi 2017, considering that such declaration of default could affect the restructuring process.

Oleh karenanya selama masa penangguhan sampai dengan restrukturisasi MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 disetujui, maka RBA dibebaskan dari kewajiban pembayaran bunga dan denda sebagaimana dimaksud pada Perjanjian MTN Awal.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan kembali menerima surat dari PT MNC Asset Management, dengan nomor surat No.216/MNCAM/DIR/XII/2022 perihal surat tanggapan masa penangguhan, yang berisi menyetujui permohonan perpanjangan waktu (Masa Penangguhan) sampai dengan 90 hari sejak tanggal 20 Desember 2022, mengingat diperlukannya waktu untuk berkoordinasi dengan pemegang unit penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait lainnya, sehubungan dengan proses restrukturisasi.

Pada tanggal 20 Januari 2023, Perusahaan kembali menerbitkan surat yang ditujukan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, perihal surat pemberitahuan pembelian kembali sebagian MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 oleh PT Ricobana Abadi, yang berisi bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 RBA telah membeli kembali sebagian MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 sebesar Rp20.947.500.000 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari jumlah pokok MTN sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah). sehingga, jumlah pokok MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017 menjadi sebesar Rp379.052.500.000.

Pada tanggal 14 Maret 2023, Perusahaan kembali menerbitkan surat, dengan nomor surat No.015/RBADIR/III/2023 perihal surat perpanjangan masa penangguhan, yang berisi permohonan perpanjangan masa penangguhan selama 90 hari sejak tanggal 20 Maret 2023 untuk menyelesaikan proses restrukturisasi MTN I Ricobana Abadi Tahun 2017

Pada tanggal 16 Maret 2023, Perusahaan kembali menerima surat dari PT MNC Asset Management, dengan nomor surat No.074/MNCAM/DIR/III/2023 perihal surat tanggapan perpanjangan masa penangguhan, yang berisi terkait permohonan perpanjangan masa penangguhan selama 90 hari sejak tanggal 20 Maret 2023, pada prinsipnya dapat dilakukan, mengingat belum adanya tanggapan dari Kejaksaan Agung RI atau OJK.

Pada tanggal 12 Juni 2023, Perusahaan mengajukan perpanjangan 90 hari masa remedy sejak tanggal 20 Juni 2023 melalui Surat No.026/RBA-DIR/VI/2023 dimana atas surat tersebut telah mendapat tanggapan berupa persetujuan perpanjangan 90 hari, masa remedy melalui Surat No137/MNCAM/DIR/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.

Pada tanggal 12 September 2023, Perusahaan mengajukan perpanjangan 90 hari masa remedy sejak tanggal 20 September 2023 melalui Surat No.042/RBA-DIR/IX/2023 dimana atas surat tersebut telah mendapat tanggapan berupa persetujuan perpanjangan 90hari, masa remedy melalui Surat No207/MNCAM/DIR/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

Therefore, during the Suspension Period until the restructuring of MTN I Ricobana Abadi 2017 is approved, RBA shall be exempted from the obligation to pay interest and penalties as stipulated in the Initial MTN Agreement.

On December 30, 2022, the Company received another letter from PT MNC Asset Management, with letter No. 216/MNCAM/DIR/XII/2022 regarding the response to the suspension period request. The letter stated that the request for an extension of time (Suspension Period) of up to 90 days from December 20, 2022 was approved, considering that additional time was required to coordinate with the unit holders and/or the Financial Services Authority (OJK), as well as other related parties, in connection with the restructuring process.

On January 20, 2023, the Company issued another letter addressed to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia regarding the notification of the partial buyback of MTN I Ricobana Abadi 2017 by PT Ricobana Abadi. The letter stated that on December 16, 2022, RBA had repurchased a portion of MTN I Ricobana Abadi 2017 amounting to Rp20,947,500,000 (twenty billion nine hundred forty-seven million five hundred thousand rupiah) from the total principal amount of Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah). Accordingly, the outstanding principal of MTN I Ricobana Abadi 2017 became Rp379,052,500,000.

On March 14, 2023, the Company issued another letter No. 015/RBA-DIR/III/2023 regarding a request for an extension of the suspension period, which contained a request for an additional 90-day suspension period starting from March 20, 2023 to complete the restructuring process of MTN I Ricobana Abadi 2017.

On March 16, 2023, the Company received another letter from PT MNC Asset Management, with letter No. 074/MNCAM/DIR/III/2023 regarding the response to the request for the extension of the suspension period. The letter stated that, in principle, the requested 90-day extension from March 20, 2023 could be granted, considering that there had been no response from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia or the Financial Services Authority (OJK).

On June 12, 2023, the Company submitted a request for a 90-day extension of the remedy period starting from June 20, 2023 through Letter No. 026/RBA-DIR/VI/2023. This request received a response approving the 90-day extension of the remedy period through Letter No. 137/MNCAM/DIR/VI/2023 dated June 15, 2023.

On September 12, 2023, the Company submitted another request for a 90-day extension of the remedy period starting from September 20, 2023 through Letter No. 042/RBA-DIR/IX/2023. This request was responded to with approval for the 90-day extension of the remedy period through Letter No. 207/MNCAM/DIR/IX/2023 dated September 13, 2023.

Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan mengajukan perpanjangan 90 hari masa remedys ejak tanggal 13 September 2023 melalui Surat No.059/RBA-DIR/IX/2023 dimana atas surat tersebut telah mendapat tanggapan mengenai masa penangguhan pembayaran MTNI Ricobana Abadi 2017 ("MTNI") sebagai upaya dari rencana restrukturisasi MTNI harus disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan ("PUP") sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perebutan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. sesuai dengan tanggapan PUP skema restrukturisasi baru akan dibahas dengan semua pihak setelah ada putusan inkrah dan unit penyertaan yang menjadi barang bukti dalam proses hukum dikembalikan kepada PUP melalui Surat No.283/MNCAM/DIR/IX/2023 tanggal 20 Desember 2023.

On December 1, 2023, the Company submitted another request for a 90-day extension of the remedy period through Letter No. 059/RBA-DIR/IX/2023. In response to the letter, it was stated that the suspension of payment for MTN I Ricobana Abadi 2017 ("MTNI") as part of the MTNI restructuring plan must first be submitted to the Unit Holders (PUP) as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2023 regarding the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts. Based on the response from the Unit Holders, the new restructuring scheme would be discussed with all parties after a final and binding court decision (inkrah) has been issued and the participation units that became evidence in the legal process have been returned to the Unit Holders, as stated in Letter No. 283/MNCAM/DIR/XII/2023 dated December 20, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo utang MTN adalah masing-masing sebesar Rp379.052.500.000.

As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the outstanding balance of the MTN payable amounted to Rp379,052,500,000, respectively.

20. UTANG BANK

20. BANK LOANS

	2025
PT Bank Capital Indonesia Tbk	173.210.733.675
Sub jumlah	173.210.733.675
Dikurangi: Bagian jangka pendek	(166.811.576.550)
Bagian jangka panjang	6.399.157.125

PT Bank Capital Indonesia Tbk ("Bank Capital")

Pada bulan Maret 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Aksep (PA) sebesar Rp 100.000.000.000, yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu satu tahun.

Pada tanggal 30 Mei 2016, Perusahaan dan Bank Capital sepakat merubah fasilitas di atas dengan perubahan sebagai berikut:

- PA berjangka pendek menjadi PA berjangka sebesar \$AS 17.000.000
- Jangka waktu pinjaman dari 9 Juni 2016 - 9 Juni 2019
- Jadwal pembayaran pokok pinjaman:
 - Tahun pertama : nihil (grace period)
 - Tahun kedua : sebesar \$AS 3.800.000
 - Tahun ketiga : sebesar \$AS 13.200.000.

Perusahaan wajib membayar bunga sebesar 10% per tahun, provisi nihil, dan bank administrasi sebesar Rp 25.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo utang bank masing-masing sebesar Rp173.210.733.675 dan Rp166.811.576.550.

	2024	
PT Bank Capital Indonesia Tbk	166.811.576.550	
Sub total	166.811.576.550	
Less: current maturities	(159.813.788.597)	
Long-term maturities	6.997.787.953	

PT Bank Capital Indonesia Tbk ("Bank Capital")

In March 2015, the Company obtained Acceptance Loan facility ("PA") amounting to Rp 100,000,000,000, which was used to finance working capital with one year term.

On May 30, 2016, the Company and Bank Capital agreed to amend above facility, with the following changes :

- PA short term facility became PA term loan of US\$ 17,000,000
- Loan facility period from June 9, 2016 - June 9, 2019
- Principal payment schedules:
 - First year : nil (grace period)
 - Second year : amounting to US\$ 3,800,000
 - Third year : amounting to US\$ 13,200,000.

The Company is required to pay interest at 10% per annum, nil provision, and administrative bank of Rp 25,000,000.

As of December 31, 2025 and 2024, the balance of bank loans amounted to Rp173,210,733,675 and Rp166,811,576,550, respectively.

Grup memberikan jaminan tambahan sebagai berikut:

1. Tanah kosong Sertifikat Hak Milik No. 2.791 (2.229 m²), No. 847 (6.527 m²), No. 864 (3.250 m²), No. 1475 (3.306 m²), No. 3092 (3.486 m²) Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Semarang atas nama Wijaya Mulia.
2. 100% saham PT Gunung Berkas Utama, dengan perincian sebagai berikut:
 - Gadai Saham PT Gunung Berkas Utama yang dimiliki oleh PT Bengalon karya Bara sebanyak 900 lembar saham senilai Rp 900.000.000.
 - Gadai Saham PT Gunung Berkas Utama yang dimiliki oleh PT Adikarsa Alam Resources sebanyak 600 lembar saham senilai Rp 600.000.000.
3. 100 % saham PT Electra Grand Mining, dengan perincian sebagai berikut:
 - Gadai Saham PT Electra Grand Mining yang dimiliki oleh Freddy Gunawan sebanyak 875 lembar saham senilai Rp 875.000.000.
 - Gadai Saham PT Electra Grand Mining yang dimiliki oleh Dwi Hendra sebanyak 125 lembar saham senilai Rp 125.000.000.
4. 1 unit mobil Aston Martin BD5 tahun 2009, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. F8707532G atas nama Wijaya Mulia dengan Nomor Polisi B3RDY.
5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") 1 unit apartemen Gandaria 1 Park Residence Menara B lantai 10 unit tipe E 3BR.

Pada tanggal 29 Agustus 2018, berdasarkan persetujuan restrukturisasi, fasilitas kredit mengalami perubahan dalam hal jangka waktu fasilitas tersebut menjadi 48 bulan terhitung sejak tanggal 7 September 2018 hingga jatuh tempo pada 7 Agustus 2022, dan perubahan suku bunga menjadi 7% per tahun.

Pada tanggal 9 Maret 2020, Perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas menjadi 64 bulan kedepan dengan pembayaran sebagai berikut:

- Bulan 1-12: pembayaran bunga saja sebesar 4% p.a.
- Bulan 13-36: Pembayaran angsuran (Bunga + Pokok) sebesar \$AS 225.000 + kekurangan pembayaran bunga sebesar 3% di bulan 1-12 yang diangsur 24 kali angsuran.
- Bulan 37-64 : Pembayaran angsuran (Bunga + Pokok) sebesar \$AS 225.000 (Angsuran bulan 64 sebesar sisa saldo yang belum terbayar).

Sehubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman bank antara Perusahaan dengan Bank Capital dimana Perusahaan wajib membayar bunga kepada Bank setiap bulan pada tiap tanggal 25 dan wajib membayar kembali seluruh pinjaman kepada Bank pada saat tanggal jatuh tempo. Dan jika Perusahaan lalai dalam membayar jumlah, baik jumlah utang pokok, bunga, provisi, biaya-biaya, denda dan/atau jumlah lain yang terutang dan wajib dibayar oleh Perusahaan kepada Bank pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan secara seketika dan sekaligus lunas.

The Group provides additional guarantees as follows:

1. Vacant land with Certificate of Ownership No. 2791 (2,229 m²), No. 847 (6,527 m²), No. 864 (3,250 m²), No. 1475 (3,306 m²), No. 3092 (3,486 m²) Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Semarang under the name of Wijaya Mulia.
2. 100% shares of PT Gunung Berkas Utama, with the following details:
 - Pawn 900 shares of PT Gunung Berkas Utama with nominal value of Rp 900,000,000 owned by PT Bengalon karya Bara.
 - Pawn 600 shares of PT Gunung Berkas Utama with nominal value of Rp 600,000,000 owned by PT Adikarsa Alam Resources.
3. 100% shares of PT Electra Grand Mining, with the following details:
 - Pawn 875 shares of PT Electra Grand Mining with nominal value of Rp 875,000,000 owned by Freddy Gunawan.
 - Pawn 125 shares of PT Electra Grand Mining with nominal value of Rp 125,000,000 owned by Dwi Hendra.
4. 1 unit of Aston Martin DB 5 in 2009, Proof of Ownership of Motor Vehicles No. F8707532G under the name of Wijaya Mulia with Police Number B3RDY.
5. Binding Agreement of Sale and Purchase ("PPJB") 1 unit of Gandaria apartment 1 Park Residence Menara B, 10th floor type E 3BR.

On August 29, 2018, based on the restructuring agreement, the credit facility changed in the terms of the term of the facility to 48 months from September 7, 2018 to maturity on August 7, 2022, and changes in interest rates to 7% per annum.

On March 9, 2020, the Company submitted an application for an extension of the term of the facility to be 64 months ahead with the following payment:

- Months 1-12: interest payments only at 4% p.a.
- Months 13-36: Installment payments (Interest + Principal) in the amount of US\$ 225,000 + underpaid interest of 3% in months 1-12 paid in installments 24 times.
- Months 37-64: Installment payments (Interest + Principal) in the amount of US\$ 225,000 (64 month installments equal to the remaining outstanding).

In connection with the terms and conditions contained in the bank loan agreement between the Company and Capital Bank where the Company is obliged to pay interest to the Bank every month on every 25th and is obliged to repay the entire loan to the Bank on the due date. And if the Company fails to pay the amount, both the principal amount, interest, fees, costs, fines and / or other amounts owed and payable by the Company to the Bank at the time specified in the agreement become due and payable by the Company immediately and in full.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan tidak melakukan pembayaran bunga secara rutin tiap bulan kepada Bank Capital. Sehingga Perusahaan melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan sehingga pinjaman ke Bank Capital pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan secara seketika dan sekaligus. Dan sejak tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mengklasifikasikan pinjaman ke Bank Capital pada klasifikasi jangka pendek.

On December 31, 2025 and 2024, the Company did not make regular monthly interest payments to Capital Bank. So that the Company violates the terms and conditions that must be met by the Company so that the loan to Capital Bank on December 31, 2020 becomes due and must be paid by the Company immediately and at once. And since December 31, 2020, the Company has classified loans to Capital Bank in the short-term classification.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akrual beban bunga Perusahaan ke Bank Capital masing-masing sebesar Rp22.475.015.035.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company's interest expense accrual to Capital Bank amounted to Rp 22,475,015,035.

21. LIABILITAS SEWA

21. LEASE LIABILITIES

	2025	2024	
PT Surya Artha Nusantara Finance	-	751.912.251	PT Surya Artha Nusantara Finance
PT Indomobil Finance	-	390.625.607	PT Indomobil Finance
PT Bank Central Asia Tbk	58.983.754	184.027.847	PT Bank Central Asia Tbk
Sub jumlah	58.983.754	1.326.565.705	Sub total
Dikurangi: Bagian jangka pendek	58.983.754	1.242.883.349	Less: current maturities
Bagian jangka panjang	-	83.682.356	Long-term maturities

22. IMBALAN PASCA KERJA

22. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo imbalan pasca kerja berdasarkan laporan aktuaris Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits, aktuaris independen, sebagaimana tertera dalam laporannya masing-masing tertanggal 30 Maret 2026 dan 24 Maret 2025. Metode yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the balance of post-employment benefit obligation is based on the actuarial report of Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits, independent actuary, as stated in its report dated March 30, 2026 and March 24, 2025, respectively. The method used in the actuarial valuation is the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

31 Desember 2025 dan 2024 / December 31, 2025 and 2024		
Usia pensiun normal	56 tahun / years	Normal pension age
Tingkat diskonto	5,7% (2024: 7,0%)	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1% (2024: 5,0%)	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	TMI IV - 2019 / TMI IV- 2019	Mortality rate

Rekonsiliasi perubahan pada kewajiban imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in liability for employee benefits which was recognized at the statement of financial position are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	21.610.320.598	24.875.815.369	Beginning balance
Biaya jasa kini	2.333.305.874	2.285.064.755	Current service cost
Biaya jasa lalu	(213.033.907)	(3.372.936.592)	Past service cost
Biaya bunga	1.127.449.187	2.093.433.153	Interest cost
Pembayaran imbalan	(725.616.125)	(4.089.882.117)	Benefit payments
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(3.245.398.619)	(181.173.970)	Actuarial (gain) loss recognized in other comprehensive income
Kewajiban akhir periode	20.887.027.008	21.610.320.598	Liabilities at the end of the Period

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2025
Biaya jasa kini	2.333.305.874
Biaya jasa lalu	(213.033.907)
Biaya bunga	1.127.449.187
Beban imbalan pasca kerja	3.247.721.154

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2025
Saldo awal	21.610.320.598
Pembayaran imbalan	(725.616.125)
Biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di:	
Laba rugi	3.247.721.154
Penghasilan komprehensif lain	(3.245.398.619)
Nilai akhir periode	20.887.027.008

The Group's post-employment benefit obligations included in the balance sheet:

	2024	
	2.285.064.755	Current service cost
	(3.372.936.592)	Past service cost
	2.093.433.153	Interest cost
	1.005.561.316	Post-employment benefits expense

The movements of the post-employment benefits liabilities are as follows:

	2024	
	24.875.815.369	Beginning balance
	(4.089.882.117)	Benefit payments
		Post-employment benefits expense (income) recognized in:
	1.005.561.316	Profit or loss
	(181.173.970)	Other comprehensive income
	21.610.320.598	Ending balance

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership
PT Trada Alam Minera Tbk	6.537.292.419	52,30%
PT Asabri (Persero)	1.014.086.000	8,11%
Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	4.948.007.363	39,59%
Jumlah	12.499.385.782	100,00%

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai saham Perusahaan.

23. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Jumlah/ Total	Shareholders
653.729.241.900	PT Trada Alam Minera Tbk
101.408.600.000	PT Asabri (Persero)
494.800.736.300	Public (each below 5% ownership)
1.249.938.578.200	Total

As of December 31, 2025 and 2024, there were no shares held by the members of Board of Commissioners and Directors.

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

As of December 31, 2025 and 2024, there were no shares held by the members of Board of Commissioners and Directors:

	2025	2024	
Agio saham			Premium on share capital
Penawaran umum terbatas	250.000.000.000	250.000.000.000	Limited public offering
Waran Seri 1	53.959.820.259	53.959.820.259	Series warranty 1
Biaya penerbitan saham			Share issuance cost
Penawaran umum perdana	(11.622.799.033)	(11.622.799.033)	Initial public offering
Penawaran umum terbatas I	(3.468.143.216)	(3.468.143.216)	Limited public offering I
			Difference in value of business
Selisih nilai kombinasi bisnis entitas sepengendali	(28.990.531.159)	(28.990.531.159)	combination of entities under common control
Neto	259.878.346.851	259.878.346.851	Net

Balance of premium on share capital resulted from the difference between the proceeds from the initial public offering of 500,000,000 shares to the public at Rp600 per share and the par value of the shares issued (Rp100 per share) amounting to Rp 250,000,000,000. The costs incurred in relation to the public offering amounted to Rp11,622,799,033.

The balance of agio shares is derived from the difference between the proceeds received from the exercise of Warrant Series I on 499,385,782 shares to the public at Rp 100 per share with its nominal value (Rp 150 per share) amounting to Rp 53,959,820,259.

In 2014, the Company conducted a Limited Public Offering I ("PUT I") through Right Issue with Pre-emptive Rights (Note 1b). The direct costs incurred in respect of the issuance of the Company's shares through PUT I amounted to Rp3,468,143,216.

The balance of business combination of entities under common control represents the difference amounting to Rp28,990,531,159 between the acquisition cost and the book value of net assets of SMR, a subsidiary, acquired on December 17, 2010 when the Company made an investment in 94,700,000 shares representing 99.68% shares ownership in SMR.

25. REVENUE

	2025	2024	
Jasa penambangan	49.224.217.618	51.810.124.718	Mining services
Penyewaan alat berat	9.604.833.500	658.717.301	Rental of heavy equipment
Lain lain	975.000.004	27.646.085.666	Others
Jumlah	59.804.051.122	80.114.927.685	Total

Rincian penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of revenues obtained from each customers representing more than 10% of the total consolidated revenues are as follows:

	Pendapatan / Revenue		Persentase terhadap total pendapatan/ Percentage to total revenues		
	2025	2024	2025	2024	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
PT Berau					PT Berau
Coal Energy	50.344.536.122	42.808.207.107	84,18%	53,50%	Coal Energy
PT Manggala					PT Manggala
Usaha Manunggal	9.459.515.000	37.206.720.578	15,82%	46,50%	Usaha Manunggal
	59.804.051.122	80.014.927.685	100%	100%	Book Value

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN

26. COST OF REVENUE

	2025	2024	
Penyusutan aset tetap	67.989.823.167	70.728.730.845	Depreciation of fixed assets
Gaji, upah dan tunjangan	20.516.736.292	20.582.975.277	Salaries, wages and allowances
Sewa	18.086.376.119	31.769.473.099	Rent
Pemeliharaan dan perbaikan	4.479.078.881	5.500.168.827	Repairs and maintenance
Biaya kantor	240.651.915	462.903.043	Office Expense
Asuransi	190.870.659	5.288.384.496	Insurance
Penambangan	-	1.189.289.174	Mining
Lainnya	3.277.357.135	17.909.019.729	Others
Jumlah	114.780.894.168	153.430.944.490	Total

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

	2025	2024	
Gaji, upah dan bonus	18.511.311.139	19.473.934.130	Salary and benefits
Imbalan pasca kerja	3.247.721.153	1.005.561.316	Post-employment benefits
Jasa tenaga ahli	803.073.077	631.994.578	Professional services
Penyusutan aset tetap	724.761.700	639.046.791	Depreciation
Lainnya	1.919.333.661	8.629.815.147	Others
Jumlah	25.206.200.730	30.380.351.962	Total

28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO

28. OTHER INCOME (EXPENSES) - NET

	2025	2024	
Pendapatan lain-lain			Other income
Keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap	4.336.936.937	19.279.368.152	Gain on sales and disposal of fixed assets
Laba selisih kurs	-	-	Exchange rate gain
Lainnya	325.164.916	-	Others
Sub Jumlah	4.662.101.853	19.279.368.152	Sub Total
Beban lain-lain			Other expense
Kerugian penghapusan aset tetap	-	(1.499.413.019)	Loss on inventory write-off
Rugi selisih kurs	(6.398.850.679)	(6.941.970.484)	Exchange rate loss
Beban penyisihan persediaan	-	(590.770.310)	Allowance for inventory impairment
Lainnya	(11.230.430)	(1.932.796.243)	Others
Sub Jumlah	(6.410.081.109)	(10.964.950.056)	Sub Total
Jumlah	(1.747.979.256)	8.314.418.096	Total

29. INFORMASI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

Sifat hubungan dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related party</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationships</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Alam Abadi Resources	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entity</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other Receivables</i>
PT Kalimantan Infra Gemilang	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entity</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other Receivables</i>
PT Gunung Berkas Utama	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entity</i>	Piutang lain-lain/ <i>other receivable</i>
PT Gunung Bara Utama	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entity</i>	Piutang Usaha/ <i>Trade Receivable</i>

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi di atas adalah sebagai berikut:

Details of balances arising from transactions with related parties above are as follows:

	2025	2024	
Aset			Assets
<u>Piutang usaha</u>			<u>Trade receivables</u>
PT Gunung Bara Utama	20.706.246.101	20.706.246.101	PT Gunung Bara Utama
Penyisihan penurunan nilai	(20.706.246.101)	(20.706.246.101)	Allowance for impairment
Jumlah	-	-	Total
<u>Piutang lain-lain</u>			<u>Trade receivables</u>
PT Gunung Berkas Utama	500.000.000	500.000.000	PT Gunung Berkas Utama
PT Kalimantan Infra Gemilang	86.929.078	86.929.078	PT Kalimantan Infra Gemilang
PT Alam Abadi Resources	20.669.790	20.669.790	PT Alam Abadi Resources
Penyisihan penurunan nilai	(107.598.868)	(107.598.868)	Allowance for impairment
Jumlah	500.000.000	500.000.000	Total
Jumlah	500.000.000	500.000.000	Total
Persentase terhadap aset konsolidasian	0,08%	0,07%	Percentage to consolidated assets

Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personel manajemen kunci. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci, yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek masing-masing adalah sebesar Rp7.667.245.490 dan Rp7.928.274.543, persentase terhadap jumlah beban terkait masing-masing adalah sebesar 20,07% dan 19,79%.

The Board of Commissioners and Directors

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors are key management personnel. As of December 31, 2025 and 2024, compensation paid or payable to key management, all of which are short-term employee benefits amounted to Rp7,667,245,490. and Rp7,928,274,543, respectively, and the percentage of total related expenses amounted to 20.07 % and 19.79%, respectively.

30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Faktor risiko keuangan

Grup memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan yang untuk saat ini cenderung terbatas. Untuk mengurangi risiko ini, Grup berusaha untuk memastikan pendapatan jasa dilakukan dengan menyeleksi pelanggan-pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat serta reputasi yang baik. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih (Catatan 5 dan 6).

Grup juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank dalam bentuk rekening lancar dan kas yang dibatasi penggunaannya. Untuk mengatasi risiko ini, Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank yang mempunyai reputasi yang baik (Catatan 4).

Grup telah menempatkan kas dalam lembaga keuangan yang teratur dan terkemuka. Piutang usaha RBA terkonsentrasi kepada PT Berau Coal Energy dan PT Gunung Bara Utama. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan terkait dengan konsentrasi pelanggan ini karena PT Berau Coal Energy dan PT Gunung Bara Utama dianggap sebagai pihak yang layak kredit dengan eksposur minimal atas kerugian penurunan nilai.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

30. FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial risk factors

The Group has several risk exposures to financial instruments in the form of credit risk, market risk and liquidity risk.

Financial risk management is designed to minimize the potential and adverse financial effects which might arise from such risks.

The Group's financial risk management objectives and policies are summarized as follows:

a. Credit risk

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will default on its obligations and cause the other party to incur a financial loss.

Credit risk faced by the Group arising from the credit granted to its customers is currently very limited. Nevertheless, to mitigate this risk, the Group tries to ensure that revenues are made selecting customers with strong financial condition and good reputation. Moreover, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts (Note 5 and 6).

The Group is also exposed to credit risk arising from the funds placed by the Group in banks in the form of current account and restricted cash. To mitigate this risk, the Group has a policy to place its funds only in banks that have good reputation (Note 4).

The Group has placed its cash with financial institutions which are regulated and reputable. RBA's trade receivables and are concentrated to PT Berau Coal Energy and PT Gunung Bara Utama. The management believes that there is no significant credit risk with regard to this customers concentration because PT Berau Coal Energy and PT Gunung Bara Utama are considered as a credit worthy party with minimal exposure of impairment loss.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statement of financial position. The Group does not hold any collateral as security.

b. Risiko pasar

Risiko mata uang

Grup melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing dan karena itu terkena risiko mata uang asing. Kelompok Usaha tidak memiliki kebijakan mata uang asing lindung nilai. Namun manajemen memonitor eksposur mata uang asing dan akan mempertimbangkan lindung nilai risiko mata uang asing yang signifikan harus diperlukan.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank dan medium term notes (Catatan 19 dan 20). Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing saldo utang bank dan medium term notes Grup mencerminkan sekitar 85% dan 79,89% dari jumlah liabilitas.

Kebijakan Grup adalah untuk meminimalkan eksposur suku bunga atas pinjaman yang digunakan untuk ekspansi usaha dan kebutuhan modal kerja. Untuk mencapai hal tersebut Grup secara teratur menilai dan memantau saldo kas dengan mengacu pada rencana bisnis dan operasi sehari-hari.

Grup tidak memiliki instrumen keuangan bunga mengambang yang berdampak terhadap arus kas risiko suku bunga.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Kelompok Usaha akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa periode ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

b. Market risk

Foreign currency risk

The Group transacts business in some foreign currencies and therefore is exposed to foreign exchange risk. The Group does not have a foreign currency hedging policy. However management monitors foreign exchange exposure and will consider hedging significant foreign exchange risk should the need arises.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Its exposure to this risk is primarily associated with bank loan and medium term notes (Notes 19 and 20). On December 31, 2025 and 2024, respectively reflecting the Group's bank loan and medium term notes balance of about 85% and 79,89% of total liabilities.

The Group's policy is to minimize interest rate exposure on borrowings used for business expansion and working capital requirements. To achieve this the Group regularly assesses and monitors cash balances with reference to business plans and day-to-day operations.

The Group does not have any floating rate financial instruments that expose its cash flows to interest rate risk.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk when the Group will encounter difficulty in raising funds to meet its commitments associated with financial instruments.

Liquidity risk is managed through maintaining the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flow projection and realization in the subsequent periods and ensure the availability of financing through committed credit facilities

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on undiscounted contractual payments as at 31 December 2025 and 2024.

	2025				
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1- 2 tahun / 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Jumlah / Total	
Utang usaha	44.452.614.093	-	-	44.452.614.093	Utang usaha
Beban akrual	22.877.828.978	-	-	22.877.828.978	Accrued expense
Utang lain-lain	3.691.188.152	-	704.986.920	4.396.175.072	Other payables
Medium term notes	379.052.500.000	-	-	379.052.500.000	Medium term notes
Utang bank	173.210.733.675	-	-	173.210.733.675	Bank loans
Liabilitas sewa	58.983.754	-	-	58.983.754	Lease liabilities
	623.343.848.652	-	704.986.920	624.048.835.572	

	2024				
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1- 2 tahun / 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Jumlah / Total	
Utang usaha	48.800.914.278	-	-	48.800.914.278	Utang usaha
Beban akrual	28.997.981.358	-	-	28.997.981.358	Accrued expense
Utang lain-lain	11.049.698.908	-	1.196.250.538	12.245.949.446	Other payables
Medium term notes	379.052.500.000	-	-	379.052.500.000	Medium term notes
Utang bank	166.811.576.550	-	-	166.811.576.550	Bank loans
Liabilitas sewa	1.242.883.349	83.682.356	-	1.326.565.705	Lease liabilities
	635.955.554.443	83.682.356	1.196.250.538	637.235.487.337	

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan lancar diakui pada biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan.

Fair value estimation

The fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

The fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company considers that the carrying amounts of current financial assets and current financial liabilities carried at amortised cost in the consolidated financial statements approximate its fair values, as the impact of discounting is not significant.

31. INFORMASI SEGMENT

Segmen usaha dilaporkan dengan cara yang sesuai dengan pelaporan internal yang dipersiapkan untuk pembuat keputusan operasional. Pembuat keputusan operasi adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup mengklasifikasikan pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitasnya ke dalam satu segmen, yaitu segmen jasa penambangan sebagai informasi segmen.

31. SEGMENT INFORMATION

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intra group transactions are eliminated.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, the Group classified its revenues, expenses, results of operations, assets and liabilities into one segment, namely mining services segment as segment information.

32. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Entitas anak

PT Ricobana Abadi (RBA)

a. Perjanjian dengan PT Berau Coal Energy

Pada tanggal 15 Desember 2023, PT Berau Coal mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kontrak PT Ricobana Abadi Sambarata Mine Operation dengan Nomor: 107/BC/BOD-AWD/XII/2023 sebagai berikut:

Merujuk pada Perjanjian Pengupasan dan Pengangkutan Lapisan Tanah Penutup (Overburden) No. 083/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, Perjanjian Pengangkutan Batubara (Coal Hauling) No. 084/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan Perjanjian Sewa No. 085/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 di Area Sambarata Mine Operation (SMO) Blok B-East beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya secara keseluruhan disebut "Perjanjian Penambangan") yang telah ditandatangani oleh PT Berau Coal ("Perusahaan") dan PT Ricobana Abadi ("Kontraktor"), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal di bawah ini:

1. Bahwa selama tahun 2023, Perusahaan telah menerbitkan 5 (lima) surat teguran kepada Kontraktor sehubungan dengan kinerja produksi Kontraktor di Pit C2H Utara Sambarata.
2. Berdasarkan ketentuan terkait Pengakhiran Perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 24 Perjanjian Penambangan, Perusahaan berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak bilamana Kontraktor tidak dapat memenuhi Kunci Ukuran Keberhasilan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam 1 (satu) tahun, atau selama 4 (empat) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.

Mengacu pada kedua hal di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan memutuskan untuk melakukan Pengakhiran atas Perjanjian Penambangan yang akan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2024 serta mengalihkan seluruh volume pekerjaan kepada Perusahaan lain yang ditunjuk. Selanjutnya, dengan berakhirnya Perjanjian Penambangan maka Perusahaan dan Kontraktor akan melakukan penyelesaian terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Perusahaan akan membayar kepada Kontraktor atas Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Penambangan, berdasarkan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Subsidiary

PT Ricobana Abadi (RBA)

a. Agreement with PT Berau Coal Energy

On December 15, 2023, PT Berau Coal issued a Notice of Termination of Contract Agreement of PT Ricobana Abadi Sambarata Mine Operation with Number: 107/BC/BOD-AWD/XII/2023 as follows:

Referring to the Overburden Stripping and Transportation Agreement No. 083/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 dated May 28, 2019, Coal Hauling Agreement No. 084/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 dated May 28, 2019 and Lease Agreement No. 085/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 dated May 28, 2019 in the Sambarata Mine Operation (SMO) Block B-East Area and all amendments thereto (hereinafter collectively referred to as the "Lease Agreement"), 085/BC-RBA/DIR/AGR-CM/V/2019 dated May 28, 2019 in the Sambarata Mine Operation (SMO) Block B-East Area along with all amendments from time to time (hereinafter collectively referred to as the "Mining Agreement") signed by PT Berau Coal ("Company") and PT Ricobana Abadi ("Contractor"), we hereby convey the following matters:

1. That during 2023, the Company has issued 5 (five) letters of reprimand to the Contractor in relation to the Contractor's production performance in the C2H North Sambarata Pit.
2. Referring to the two matters above, we hereby inform you that the Company decided to terminate the Mining Agreement which will be effective from January 2, 2024 and transfer the entire volume of work to another appointed Company. Furthermore, with the termination of the Mining Agreement, the Company and the Contractor will make settlements related to the implementation of rights and obligations as follows:

Referring to the two matters above, we hereby inform you that the Company decided to terminate the Mining Agreement which will be effective from January 2, 2024 and transfer the entire volume of work to another appointed Company. Furthermore, with the termination of the Mining Agreement, the Company and the Contractor will make settlements related to the implementation of rights and obligations as follows:

1. The Company will pay the Contractor for the Work completed up to the date of termination of the Mining Agreement, based on the Minutes signed by the Parties.

2. Kontraktor dapat menarik seluruh Peralatan dan perlengkapan/spareparts, suplai bahan baku/consumable goods serta aset bergerak yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Penambangan. Perusahaan sepakat akan mengakibatkan pihak lain yang akan ditunjuk oleh Perusahaan untuk membuat dan menandatangani perjanjian jual-beli sehubungan dengan pembelian atas aset yang tidak bergerak yang dimiliki oleh Kontraktor dengan basis as-is dengan harga jual akan diatur dan disepakati kemudian.
3. Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala pembayaran kepada Sub-Kontraktor, Tenaga Kerja dan Pihak lain yang memiliki hubungan dengan Kontraktor dalam pelaksanaan Perjanjian Penambangan. Kontraktor dengan upaya terbaiknya akan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Sub Kontraktor, Tenaga Kerja dan Pihak lain dan berjanji akan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk klaim, ganti rugi, pembayaran dan segala bentuk pertanggungjawaban lainnya yang terkait dengan kewajiban Kontraktor terhadap pihak-pihak tersebut.
4. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian akan diatur dan disepakati dalam dokumen terpisah oleh Para Pihak.

b. Perjanjian dengan PT Manggala Usaha Manunggal

Perjanjian dengan PT Manggala Usaha Manunggal dengan kontrak No. 010/PJPB/MUM-RA/II/2024 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Februari 2024, Para pihak bermaksud untuk mengadakan Perjanjian ini dimana Perusahaan akan menunjuk kontraktor untuk menjalankan tugas tertentu untuk mengembangkan dan mengoperasikan di lapangan.

PT Delta Samudra ("DS")

a. Undang-undang Pertambangan No. 4/2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru ("Undang-undang Pertambangan"), yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2009 dan menjadi UU No. 4/2009. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pertambangan tersebut, seluruh entitas anak yang bergerak di bidang penambangan batubara telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan ("IUP").

Pada tanggal 1 Februari 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani dua peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang Pertambangan tersebut, yaitu PP No. 22/2010 dan No. 23/2010.

2. The Contractor may withdraw all Tools and equipment/spareparts, supplies of raw materials/consumable goods and movable assets used for the purpose of carrying out work under the Mining Agreement. The Company agrees to cause other parties to be appointed by the Company to make and sign a sale and purchase agreement in connection with the purchase of immovable assets owned by the Contractor on an as-is basis with the selling price to be arranged and agreed upon later.
3. The Contractor is fully responsible for all payments to Sub-Contractors, Labor and other Parties that have a relationship with the Contractor in the implementation of the Mining Agreement. The Contractor shall with its best efforts settle all its obligations to Sub-Contractors, Labor and other Parties and undertakes to hold the Company harmless from all forms of claims, damages, payments and any other forms of liability related to the Contractor's obligations to such parties.
4. All costs incurred in connection with the termination of the Agreement will be arranged and agreed in a separate document by the Parties.

b. Agreement with PT Manggala Usaha Manunggal

Subsequent to the balance sheet date, the Company entered into an agreement with PT Manggala Usaha Manunggal with contract No. 010/PJPB/MUM-RA/II/2024 made and signed on February 28, 2024, the parties intend to enter into this Agreement whereby the Company will appoint a contractor to carry out certain tasks to develop and operate in the field.

PT Delta Samudra ("DS")

a. Mining Law No. 4/2009

On 16 December 2008, the House of Representatives approved the new Mineral and Coal Mining Law ("Mining Law"), which was passed by the President on 12 January 2009 and became Law No. 4/2009. In accordance with the provisions of the Mining Law, all subsidiaries engaged in coal mining have obtained Mining Business Licences ("IUP").

On 1 February 2010, the President of the Republic of Indonesia signed two implementing regulations for the Mining Law, namely PP No. 22/2010 and No. 23/2010.

PP No. 22/2010 mengatur tentang pembentukan area pertambangan di Indonesia. PP No. 23/2010 menjelaskan lebih detail beragam tipe perizinan pertambangan yang ada sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Pertambangan ini, dan menjelaskan syarat dan kondisi dasar yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan maupun pihak berwenang yang mengeluarkan izin pertambangan.

Pada tanggal 21 Februari 2012 dan 11 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mengubah PP No. 23/2010 dengan menerbitkan PP No. 24/2012 dan PP No. 1/2014, yang mengatur mengenai pengalihan IUP, divestasi, dan wilayah pertambangan.

Perusahaan memonitor secara seksama perkembangan atas peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pertambangan tersebut dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap operasi Perusahaan, jika ada, pada saat peraturan peraturan pelaksana ini diterbitkan.

b. Peraturan Kehutanan

Pada tanggal 10 Maret 2006, Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.14/Menhut-II/2006 ("Peraturan Kehutanan 2006") mengenai Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menjelaskan mengenai izin untuk menggunakan hutan bukan untuk kegiatan hutan.

Menurut Peraturan Kehutanan 2006, perusahaan dapat diberikan izin perhutanan untuk menggunakan area hutan bukan untuk kegiatan perhutanan (misalnya untuk kegiatan komersial), dibatasi dengan sejumlah syarat, untuk periode selama 5 tahun (dapat diperpanjang).

Salah satu syarat signifikan berdasarkan Peraturan Kehutanan 2006 adalah untuk menyediakan lahan bukan hutan seluas dua kali dari luas hutan yang digunakan (lahan kompensasi). Lahan kompensasi kemudian harus dihutankan kembali/reboisasi.

Atau sebagai alternatif, apabila dalam 2 tahun, perusahaan pemohon IPPKH tidak dapat menyediakan lahan kompensasi yang diminta, perusahaan harus membayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak ("PNBP") secara tahunan kepada Menteri Kehutanan sebesar 1% dari jumlah nilai produksi. Peraturan Kehutanan 2006 tidak menyebutkan bagaimana menentukan jumlah nilai produksi.

Pada tanggal 10 Juli 2008, Peraturan Kehutanan 2006 telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 ("Peraturan Kehutanan 2008") antara lain mengenai penambahan bentuk kompensasi lahan untuk IPPKH, perubahan besaran PNBP, dan jangka waktu IPPKH yang berubah menjadi 20 tahun dan dapat diperpanjang.

GR No. 22/2010 regulates the establishment of mining areas in Indonesia. GR No. 23/2010 explains in more detail the different types of mining licences that exist in accordance with the Mining Law, and describes the basic terms and conditions that must be met by both the applicant and the authority issuing the mining licence.

On 21 February 2012 and 11 January 2014, the Government of Indonesia amended GR No. 23/2010 by issuing GR No. 24/2012 and GR No. 1/2014, which regulate the transfer of IUP, divestment, and mining areas.

The Company is closely monitoring the development of the implementing regulations of the Mining Law and will consider the impact on The Company operations, if any, when these implementing regulations are issued.

b. Forestry Regulations

On 10 March 2006, the Minister of Forestry issued Ministerial Regulation No. P.14/Menhut-II/2006 ("2006 Forestry Regulation") regarding Guidelines for Borrowing and Using Forest Areas which clarifies permits to use forests for non-forest activities.

According to the 2006 Forestry Regulations, companies can be granted a forestry licence to use forest areas not for forestry activities (e.g. for commercial activities), subject to a number of conditions, for a period of 5 years (renewable).

One of the significant requirements under the 2006 Forestry Regulation is to provide non-forest land twice the size of the forest used (compensation land). The compensation land must then be reforested/reforested.

Alternatively, if within 2 years, the IPPKH applicant company is unable to provide the required compensation land, the company must pay an annual Non-Tax State Revenue ("PNBP") to the Minister of Forestry of 1% of the total production value. The 2006 Forestry Regulation is silent on how to determine the amount of production value.

On 10 July 2008, the 2006 Forestry Regulation was updated through Minister of Forestry Regulation No. P.43/Menhut-II/2008 ("2008 Forestry Regulation"), among others, regarding the addition of land compensation forms for IPPKH, changes in the amount of PNBP, and the term of IPPKH which changed to 20 years and can be extended.

Pada tanggal 30 Maret 2011, Peraturan Kehutanan 2008 telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/MenhutII/2011 ("Peraturan Kehutanan 2011") antara lain mengenai perubahan kondisi dan ketentuan IPPKH.

On 30 March 2011, the 2008 Forestry Regulation was updated through Minister of Forestry Regulation No.P.18/MenhutII/2011 ("2011 Forestry Regulation") among others regarding changes to the conditions and terms of IPPKH.

Perusahaan yang saat ini sedang dalam proses memperoleh persetujuan prinsip atas IPPKH sehingga belum dapat dikenakan PNBP dan melakukan reboisasi. Perusahaan juga melakukan monitoring terus-menerus atas kepatuhan mereka terhadap peraturan kehutanan dimaksud.

The company is currently in the process of obtaining in-principle approval of IPPKH so it cannot yet be subject to PNBP and conduct reforestation. The company also conducts continuous monitoring of their compliance with the forestry regulations.

c. Peraturan Menteri No. 17/2010

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-undang Mineral No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi.

c. Ministerial Regulation No. 17/2010

On 20 December 2010, the Government of Indonesia issued an implementing regulation for Mineral Law No. 4/2009, namely Government Regulation No. 78/2010 which regulates reclamation and post-mining activities for holders of IUP-Exploration and IUP-Operasi Produksi.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

IUP-Exploration holders among other provisions, must include an exploration plan in their exploration work plan and budget and provide reclamation guarantees in the form of time deposits placed with a Government bank.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya, antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pasca tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diijinkan) dan (4) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Holders of IUP-Operasi Produksi, the provisions, among others, must prepare (1) a five-year reclamation plan; (2) a post-mining plan; (3) provide reclamation guarantees that can be in the form of joint accounts or time deposits placed with government banks, bank guarantees, or accounting reserves (if permitted) and (4) provide post-mining guarantees in the form of time deposits placed with government banks.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan liabilitas pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

The placement of reclamation and post-mining guarantees does not relieve IUP holders of the requirement to carry out reclamation and post-mining activities.

33. KELANGSUNGAN USAHA

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dengan asumsi Grup akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Penerapan dasar kelangsungan usaha didasarkan pada asumsi bahwa Perusahaan akan dapat merealisasikan asetnya dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnis normal.

33. GOING CONCERN

The consolidated financial statements of the Group have been prepared assuming that the Group will continue as a going concern. The application of the going concern basis is based on the assumption that the Group will be able to realise its assets and settle its liabilities in the normal course of business.

Grup telah mengalami kerugian berulang dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 membukukan akumulasi defisit sebesar Rp1.509,25 milyar dan liabilitas jangka pendek melebihi aset lancar sebesar Rp598,94 milyar pada tanggal 31 Desember 2025. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

The Group has experienced recurring losses where for the year ending December 31, 2025 it recorded an accumulated deficit of Rp1,509.25 billion and short-term liabilities exceeded the current assets by Rp598.94 billion as of December 31, 2025. These conditions may cast doubt about the Group's ability to continue as a going concern.

Sehubungan dengan kelangsungan usaha, Grup memperoleh dukungan keuangan dari pemegang saham untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kewajiban Grup dan akan mensubordinasikan semua kewajiban Grup kepada pihak-pihak terkait dan tidak akan meminta Grup untuk melunasi kewajibannya kepada pihak-pihak terkait setidaknya selama dua belas bulan sejak tanggal laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025.

Selain itu, untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, manajemen Grup mengambil langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai berikut:

1. Melakukan proses restrukturisasi Medium Term Note (MTN) antara PT Ricobana Abadi (RBA) dengan PT MNC Asset Management (Manager Investasi) agar RBA mendapatkan perpanjangan atas penyelesaian utang MTN yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022.
2. PT Delta Samudra menyampaikan memori peninjauan kembali atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka kelompok usaha berusaha untuk mempercepat kepemilikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan melakukan upaya perencanaan operasional PT Delta Samudra (DS).

In relation with the going concern, the Group obtains financial support from shareholders to provide sufficient funds to fulfill the Group's obligation and will subordinate all of the liabilities of the Group to its related parties and will not request the Group to settle its liabilities to the related parties for at least twelve months from the date of the consolidated financial statements as of December 31, 2025.

In addition, to maintain the continuity of its business, the Group's management has taken the following steps which have been and will be implemented continuously:

1. *Conducting the process of restructuring the Medium Term Notes loan between PT Ricobana Abadi and PT MNC Asset Management (Fund Manager) so that RBA get an extension for the settlement of MTN loan which will be mature on December 20, 2022.*
2. *PT Delta Samudra submitted a memory of the review of the revocation of the Mining Business License (IUP), the business group is trying to accelerate the ownership of the Forest Area Borrowing and Use Permit (IPPKH) and make efforts to plan the operations of PT Delta Samudra (DS).*

34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 9 Januari 2026, PT Manggala Usaha Manunggal mengeluarkan surat nomor 011/MANGGALA/BOD-EX/I/2026 mengenai permohonan pengakhiran Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara antara PT Manggala Usaha Manunggal dengan PT Ricobana Abadi (RBA). RBA merupakan anak usaha Perusahaan, sehingga penghentian perjanjian jasa penambangan batubara tersebut akan menyebabkan hilangnya sumber pendapatan Perusahaan secara konsolidasi.

Pada bulan Oktober 2025, PT Ricobana Abadi menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak No. PRIN-348/RIKSIS/KPP0508/2025 terkait permohonan restitusi lebih bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2024 sebesar Rp2.181.743.131. Pada tanggal 21 April 2026, Perseroan telah menerima Berita Acara Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan No. BA-316/KPP.0508/Pa.Pj.2/2026 dengan nilai restitusi bersih sebesar Rp1.394.931.065 setelah dikurangi denda dan sanksi atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Dalam pemeriksaan tersebut, rugi fiskal Perseroan berubah dari Rp131.166.096.593 menjadi Rp128.130.967.390. Selain itu, terdapat koreksi atas objek PPh Pasal 21 sebesar Rp517.166.760, PPh Pasal 21 Final sebesar Rp13.138.000, PPh Pasal 23 sebesar Rp23.803.642.461, PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp9.935.840.627, serta koreksi kredit PPN dan STP PPN masing-masing sebesar Rp842.493 dan Rp2.085.217.

34. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On January 9, 2026, PT Manggala Usaha Manunggal issued letter number 011/MANGGALA/BOD-EX/I/2026 regarding the request for termination of the Coal Mining Services Agreement between PT Manggala Usaha Manunggal and PT Ricobana Abadi (RBA). RBA is a subsidiary of the Company, therefore the termination of the coal mining services agreement will result in the loss of the Company's consolidated revenue source.

In October 2025, PT Ricobana Abadi received Tax Audit Order Letter No. PRIN-348/RIKSIS/KPP0508/2025 related to the application for a corporate income tax overpayment refund for fiscal year 2024 amounting to Rp2,181,743,131. On April 21, 2026, the Company received the Minutes of Final Tax Audit Discussion No. BA-316/KPP.0508/Pa.Pj.2/2026, with a net tax refund amounting to Rp1,394,931,065 after deductions for penalties and sanctions related to Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Final Income Tax Article 4 paragraph (2), and VAT.

Based on the tax audit results, the Company's fiscal loss changed from Rp131,166,096,593 to Rp128,130,967,390. In addition, there were corrections to the tax objects of Article 21 Income Tax amounting to Rp517,166,760, Final Article 21 Income Tax amounting to Rp13,138,000, Article 23 Income Tax amounting to Rp23,803,642,461, Final Income Tax Article 4 paragraph (2) amounting to Rp9,935,840,627, as well as corrections to VAT input tax credit and VAT tax collection letter amounting to Rp842,493 and Rp2,085,217, respectively.

35. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajemen Perusahaan pada tanggal 12 Mei 2026.

36. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan tersendiri entitas induk dari lampiran I sampai IV menyajikan laporan keuangan 31 Desember 2025 dan 2024 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, dimana penyertaan saham pada investasi anak dicatat menggunakan metode biaya.

35. MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated financial statements has been completed and authorized to be issued by the Company Management on May 12, 2026.

36. SUPPLEMENTARY INFORMATION

The supplementary information of the parent company only from appendix I to IV presented the financial statements December 31, 2025 and 2024 and the years ended December 31, 2025 and 2024, in which investments in subsidiary was recorded for using cost method.

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT SMR UTAMA Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SMR UTAMA Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024
ASET		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	618.438.655	658.609.752
Piutang usaha	-	-
Piutang lain-lain - neto	4.288.719.707	4.288.719.707
Pajak dibayar di muka	70.482.500	30.800.000
Investasi Pada Entitas Anak	1.239.258.800.000	1.239.258.800.000
Jumlah aset lancar	1.244.236.440.862	1.244.236.929.459
Aset tidak lancar		
Aset tetap - neto	-	20.543.766
Aset tak berwujud - net	-	-
Aset pajak tangguhan	29.705.766.720	29.705.766.720
Jumlah aset tidak lancar	29.705.766.720	29.726.310.486
JUMLAH ASET	1.273.942.207.582	1.273.963.239.945
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas jangka pendek		
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	-	107.219.347
Utang pajak	3.945.000	107.968.750
Beban akrual	22.581.961.960	22.778.661.035
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang :		
Utang bank	173.210.733.675	166.811.576.550
Jumlah liabilitas jangka pendek	195.796.640.635	189.805.425.682
Liabilitas jangka panjang		
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	38.230.166.023	36.795.846.023
Jumlah liabilitas jangka panjang	38.230.166.023	36.795.846.023
JUMLAH LIABILITAS	234.026.806.658	226.601.271.705
EKUITAS		
Modal saham - Nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 48.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh -12.499.385.782 saham	1.249.938.578.200	1.249.938.578.200
Tambahan modal disetor - neto	259.878.346.851	259.878.346.851
Defisit	(469.901.524.127)	(462.454.956.811)
JUMLAH EKUITAS	1.039.915.400.924	1.047.361.968.240
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.273.942.207.582	1.273.963.239.945

ASSETS
Current assets
Cash on hand and in banks
Trade receivables - net
Other receivables - net
Prepaid taxes
Investment in Associates
Total current assets
Non-current assets
Fixed assets – net
Intangible assets - net
Deferred tax assets
Total non-current assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Short-term liabilities
Others payables
Thrid parties
Taxes payable
Accrued expenses
Current maturities of long-term liabilities:
Bank loans
Total Current Liabilities
Non-Current Liabilites
Other payables
Related parties
Total Non-current liabilities
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share capital Rp 100 per value per share
Authorized - 48,000,000,000 shares
shares issued and fully paid - 12,499,385,782 shares
Additional paid-in capital - net
Deficits
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAMPIRAN II

APPENDIX II

PT SMR UTAMA Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SMR UTAMA Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
PENDAPATAN	-	100.000.000	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	-	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	-	100.000.000	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(1.044.918.930)	(1.354.229.416)	General and administrative expenses
Beban usaha lainnya	(6.401.648.386)	(6.998.497.257)	Other operating Expense
RUGI USAHA	(7.446.567.316)	(8.252.726.673)	LOSS ON OPERATIONS
Biaya keuangan	-	-	Finance cost
Penghasilan keuangan	-	-	Financial income
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(7.446.567.316)	(8.252.726.673)	LOSS BEFORE TAX BENEFIT
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	-	-	INCOME TAX BENEFIT - NET
RUGI NETO TAHUN BERJALAN	(7.446.567.316)	(8.252.726.673)	NET LOSS FOR THE YEAR

PT SMR UTAMA Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SMR UTAMA Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - neto/ Additional paid-in capital - net	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	
Saldo per 31 Desember 2023	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(454.202.230.138)	1.055.614.694.913	Balance as of December 31, 2023
Rugi tahun berjalan	-	-	(8.252.726.673)	(8.252.726.673)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2024	1.249.938.578.200	259.878.346.851	(462.454.956.811)	1.047.361.968.240	Balance as of December 31, 2024
Rugi tahun berjalan	-	-	(7.446.567.316)	(7.446.567.316)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2025	<u>1.249.938.578.200</u>	<u>259.878.346.851</u>	<u>(469.901.524.127)</u>	<u>1.039.915.400.924</u>	Balance as of December 31, 2025

LAMPIRAN IV

PT SMR UTAMA Tbk
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX IV

PT SMR UTAMA Tbk
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI			CASH FLOW FROM
 AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	-	100.000.000	Receipts from customers
Pembayaran kepada karyawan	-	-	Payment to employees
Pembayaran kepada pemasok dan kegiatan operasi lainnya	(1.474.491.097)	(885.802.352)	Payments to suppliers and other operating activities
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(1.474.491.097)	(785.802.352)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOW FROM
 AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	-	-	Acquisition of fixed assets
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	-	-	Net cash provided by investing activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOW FROM
 AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Utang lain-lain pihak berelasi	1.434.320.000	824.263.618	Other payables - related parties
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	1.434.320.000	824.263.618	Net cash used in financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(40.171.097)	38.461.266	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	658.609.752	620.148.486	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	618.438.655	658.609.752	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR